

LAPORAN HASIL SUPERVISI MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS
PROVINSI BANTEN

MOTTO



اطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ



*“Belajar sepanjang hayat
untuk kehidupan yang lebih layak”*



“Lifelong Education”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan **Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan PAUD Dindikbud Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2021**.

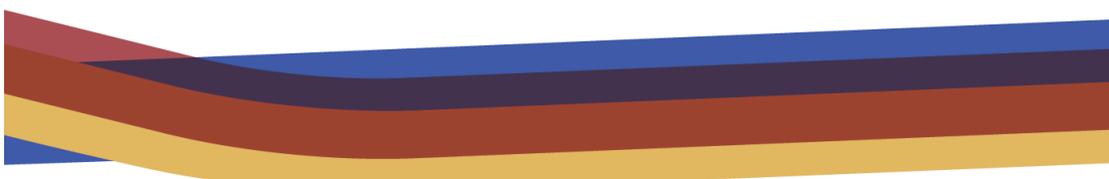
Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan ini dibuat dengan harapan agar bisa digunakan sebagai referensi bagi satuan PAUD dalam memproyeksikan atau mengevaluasi diri dari aspek kinerja maupun *performance* aktualisasi aktivitas maupun kegiatan kepala satuan sebagai manajerial, pendidik sebagai *delivered information knowledge*, dan tenaga kependidikan sebagai collect administration. Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan ini menjadi satu dokumen penting dan primer untuk mengukur keterlaksanaan dan ketercapaian satuan PAUD dalam memenuhi dan mengimplementasikan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi Banten.

Proses penjaminan mutu pendidikan dan dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan perlu didukung oleh budaya mutu. Budaya mutu dimaksud tumbuh dan berkembang pada satuan PAUD dapat dicermati dari kinerja (*performance*) para Pendidik dan Tenaga Kependidikannya, seperti Kepala Satuan, Guru, dan Tenaga Administrasi serta dapat tercermin pula pada penampilan (*performance*) anak sebagai peserta didik satuan tersebut. Secara praksis kinerja PTK dapat diukur dari kompetensinya baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik atau keterampilan pada saat proses pembelajaran.

Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab, BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV yakni Bab I meliputi; Pendahuluan yang berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan, hasil yang diharapkan, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip supervisi;

Bab II meliputi; metode supervisi yang berisi metode dan teknik supervisi, waktu dan tempat supervisi, jenis data dan perangkat supervisi, teknik dan instrumen pengumpulan data yang meliputi 1) teknik observasi; 2) teknik komunikasi; dan 3) teknik pengukuran. Responden dan teknik analisis data;

Bab III meliputi; hasil supervisi yang berisi capaian 8 (delapan) SNP, capaian *performance*, pendampingan serta analisis dan pembahasan;



Bab IV meliputi; penutup yang berisi kesimpulan, dan rekomendasi.

Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan terima kasih kepada:

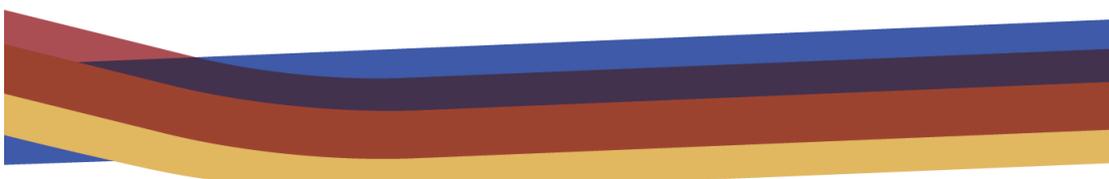
1. Para Kepala Dinas, para Kepala Bidang PAUD dan PNF beserta para Kepala Seksi, Dindikbud Kab/Kota se-Provinsi Banten;
2. Para Penilik dan Pengawas Dindikbud Kab./Kota se-Provinsi Banten;
3. Para Organisasi Mitra Kerja (IPI, HIMPAUDI, IGTKI dan APSI) Kab./Kota se-Provinsi Banten;
4. Tim Pengembang dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Dindikbud Kab./Kota se-Provinsi Banten Tahun 2021

Demikian, semoga Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan Dindikbud Tahun 2021 bermanfaat dan menjadi referensi dalam mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Terima kasih.

Serang, September 2021
Kepala BP PAUD dan Dikmas
Provinsi Banten,

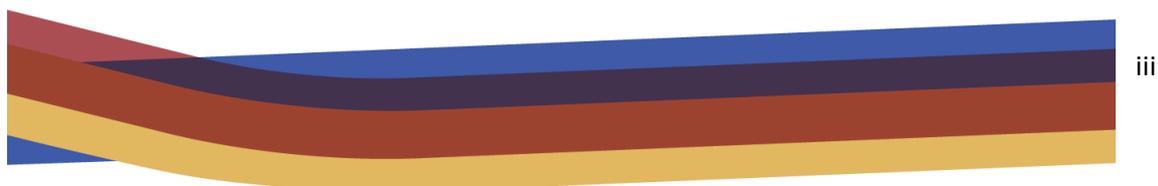


Drs. A. Rasim, M.Si.
NIP.196309051998031003



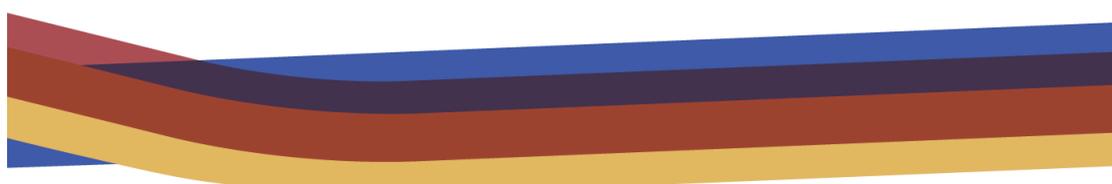
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG.....	1
DASAR HUKUM.....	5
TUJUAN	6
HASIL YANG DIHARAPKAN	6
RUANG LINGKUP	7
PRINSIP-PRINSIP SUPERVISI.....	8
BAB II METODE SUPERVISI	9
METODE DAN TEKNIK SUPERVISI	9
WAKTU DAN TEMPAT SUPERVISI.....	10
JENIS DATA DAN PERANGKAT SUPERVISI	10
TEKNIK INSTRUMEN DAN PENGUMPULAN DATA.....	11
RESPONDEN	12
TENIK ANALISIS DATA.....	13
BAB III HASIL SUPERVISI	14
CAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	14
STANDAR STPPA	15
STANDAR ISI.....	16
STANDAR PROSES	18
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	21
STANDAR SARANA PRASARANA.....	23
STANDAR PENGELOLAAN	26



DAFTAR ISI

STANDAR PEMBIAYAAN.....	29
STANDAR PENILAIAN	31
CAPAIAN <i>PERFORMANCE</i>	33
PENDAMPINGAN.....	35
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	36
BAB IV PENUTUP	42
KESIMPULAN	42
REKOMENDASI.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

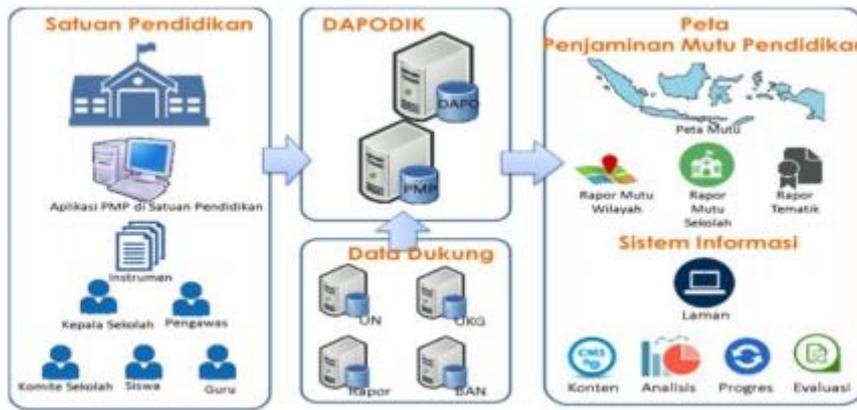
LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 3 ayat 1 menyebutkan lingkup standar nasional meliputi; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggungjawab dari setiap komponen di satuan pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Oleh karena itu pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen satuan pendidikan (whole school approach) agar seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama menjalankan budaya mutu. Sistem penjaminan mutu PAUD terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen adalah sistem penjaminan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan nasional.

Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dirancang untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan PAUD secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan PAUD secara mandiri. Pemetaan mutu dilakukan secara bertingkat, dimulai dari pemetaan mutu di satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Berikut alur pemetaan mutu pendidikan.





Gambar 1: Alur Pemetaan Mutu

Dalam PMP tersedia instrumen yang digunakan untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada pelaksanaan pemetaan mutu satuan PAUD tahun 2021 ini masih menunggu instrumen resmi dan terpusat dari Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akan secara resmi diluncurkan atau dilaksanakan pada September 2021 dalam kerangka Assesmen Nasional. Namun untuk mendukung PMP tersebut, BPPAUD dan Dikmas Provinsi Banten telah meluncurkan aplikasi Survey Capaian SNP dengan link <http://paudikmasbanten.kemdikbud.go.id/surveysnp> yang telah diedarkan ke seluruh kab/kota melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk menghimbau satuan PAUD di wilayahnya melakukan pemutakhiran Data pokok pendidikan (Dapodik) dan mengisi survey capaian SNP tersebut. Berdasarkan update terakhir Dapodik, menunjukkan PAUD di provinsi Banten secara keseluruhan berjumlah 6.474 satuan PAUD, seperti pada tabel 1 berikut ini

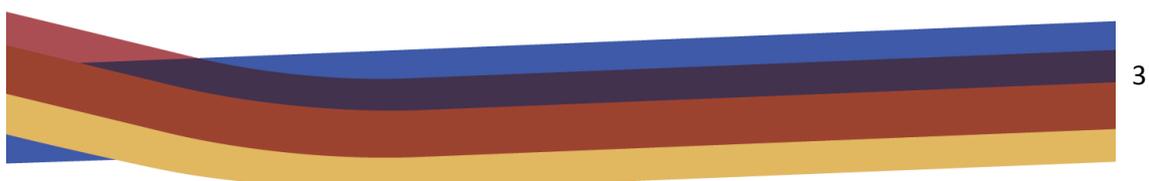


Tabel 1: Jumlah PAUD Provinsi Banten

NO.	KOTA	JUMLAH PAUD	%
1.	Kab Tangerang	1544	23.85
2.	Kab. Serang	1080	16.68
3.	Kab. Pandeglang	808	12.48
4.	Kab. Lebak	780	12.05
5.	Kota Tangerang	724	11.18
6.	Kota Tangerang Selatan	837	12.93
7.	Kota Serang	443	6.84
8.	Kota Cilegon	258	3.99
	Total	6474	100.00

Sumber: Dapodik, Pusdatin Kemendikbudristek

Sistem aplikasi Dapodik adalah aplikasi penjaring data pokok pendidikan pada kelompok jenjang PAUD. Entitas data pokok tersebut meliputi sekolah termasuk sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan proses pembelajaran di dalam rombongan belajar. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, setelah satuan PAUD mengisi survey capaian SNP dengan link <http://pauddikmasbanten.kemdikbud.go.id/surveysnp>, diperoleh update data terakhir seperti tabel 2 berikut.



Tabel 2: Hasil Survey Capaian SNP

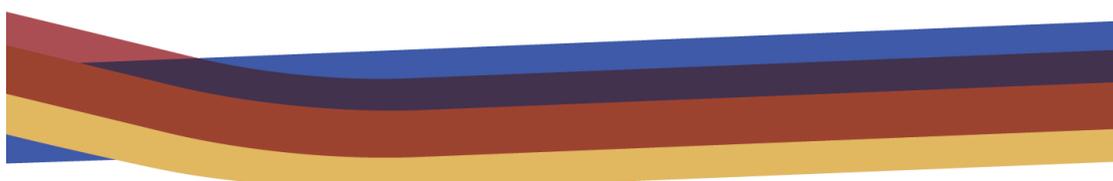
Kab/Kota	Target	Terolah	Update	%
Kab. Tangerang	1544	715	726	47%
Kab. Serang	1080	811	819	76%
Kab. Pandeglang	808	587	603	75%
Kab. Lebak	780	583	602	77%
Kota Tangerang	724	632	637	88%
Kota Tangerang Selatan	837	303	419	50%
Kota Serang	443	373	390	88%
Kota Cilegon	258	250	257	99,6%
	6474	4254	4466	68%

Sumber: Tim Pengembang BP PAUD dan Dikmas Banten

Dari data hasil survey capaian SNP di atas maka dilakukan pengolahan data dan penyusunan peta mutu satuan PAUD kab/kota se Provinsi Banten. Kegiatan pengolahan data dan penyusunan peta mutu merupakan rangkaian kegiatan dari Pemetaan Mutu Pendidikan. Kegiatan ini diawali dengan pengisian data mutu secara online oleh satuan pendidikan terhadap delapan Standar Nasional Pendidikan yang melibatkan semua unsur warga sekolah. Menjadi harapan semua pihak potret mutu sekolah tersebut menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari capaian SNP yang dikenal dengan rapor mutu sekolah. Kumpulan rapor mutu sekolah yang ada di kabupaten/kota jenjang PAUD merupakan peta mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Setelah diperoleh Peta mutu satuan PAUD tahun 2021 Provinsi Banten, maka upaya untuk memverifikasi dan memvalidasi input isian dari satuan PAUD berdasar peta mutu tahun 2021 tersebut maka dilakukan supervisi satuan PAUD tahun 2021. Supervisi mutu Satuan PAUD tahun 2021 adalah pembinaan berupa tuntunan menuju perbaikan situasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Supervisi dalam rangka pengembangan mutu adalah upaya dari UPT PAUD dan Dikmas untuk memberikan tuntunan atau pembinaan bagi setiap satuan pendidikan PAUD dan Dikmas agar mencapai standar nasional pendidikan.



Pada supervisi mutu satuan PAUD tahun 2021, menggunakan teknik evaluasi diri pada dalam bentuk supervisi online atau e-supervisi dengan link <https://pauddikmasbanten.kemdikbud.go.id/supervisi> dan pendampingan/supervisi luirng yang dilakukan dengan teknik individu berupa kunjungan dan observasi langsung ke satuan PAUD, dan teknik kelompok dengan metode dsikusi terpumpun bersama kepala sekolah dan para guru.

Akhirnya, proses penjaminan dan dirangkaikan dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan adalah perlu didukung oleh budaya mutu. Budaya mutu yang bertumbuh dan berkembang pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dicermati dari kinerja (*performance*) para Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)nya, seperti Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Administrasi serta dapat tercermin pula pada penampilan (*performance*) anak sebagai peserta didik satuan tersebut. Secara praksis kinerja PTK dapat diukur dari kompetensinya baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik/ keterampilan pada saat proses pembelajaran. semua pihak dapat mengendalikan mutu satuan PAUD agar peserta didik tetap mendapatkan pelayanan secara berkelanjutan dan berkuaitas.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Nasional 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

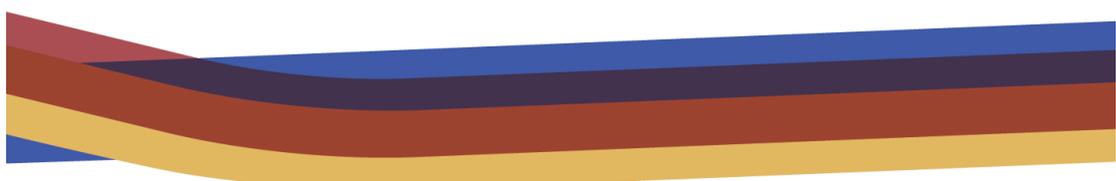
TUJUAN

Tujuan supervisi mutu satuan PAUD dalam rangka peningkatan mutu satuan PAUD diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja peserta didik agar dapat belajar dengan penuh semangat sehingga dapat mencapai prestasi belajar secara optimal;
2. Meningkatkan mutu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sehingga berhasil membantu dan membimbing peserta didik dalam mencapai prestasi belajar yang diharapkan;
3. Meningkatkan keefektifan kurikulum proses, dan materi pembelajaran sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal;
6. Meningkatkan kemampuan satuan pendidikan agar dapat memenuhi seluruh indikator standar nasional pendidikan sehingga dapat diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF.
7. Menjadi bahan rekomendasi bagi Dindik Kab/Kota dalam mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Pelaksanaan supervisi mutu satuan PAUD tahun 2021 menjadi lebih bermakna dengan hasil yang diharapkan berupa:



1. Sejumlah perubahan dari indikator mutu dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang belum terpenuhi menjadi terpenuhi;
2. Meningkatnya kualitas/kelayakan setiap satuan PAUD yang dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
3. Kemampuan para pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUD yang lebih kompeten.

RUANG LINGKUP

1. Sasaran

Sasaran supervisi adalah satuan PAUD yang menyelenggarakan program PAUD serta memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN), yang telah tersaring dari sistem aplikasi Survey Capaian Standar Nasional Pendidikan (Survey Capaian SNP) yang berjumlah 2011 satuan PAUD.

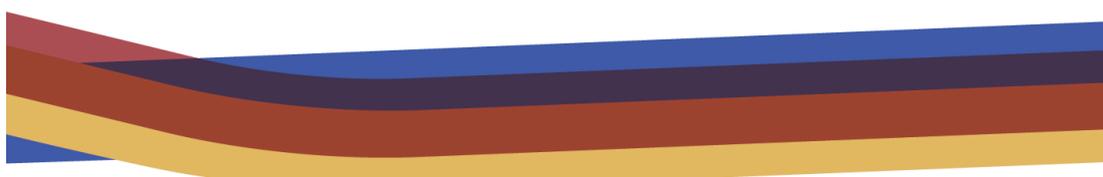
2. Pelaksana

Pelaksana supervisi mutu satuan PAUD adalah UPT BPPAUD dan Dikmas Provinsi Banten dan Bidang Pendidikan Nonformal Dindik Kab/Kota Provinsi Banten yang bekerjasama dengan para penilik dan pengawas se Provinsi Banten yang dituangkan dalam Surat Keputusan dan Surat Tugas Kepala UPT BPPAUD dan Dikmas Provinsi Banten.

3. Fokus

Supervisi satuan PAUD Provinsi Banten ini difokuskan pada:

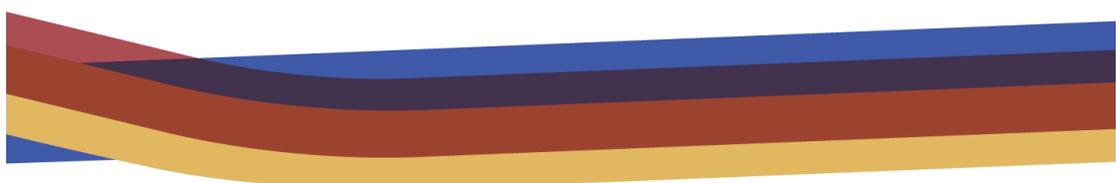
- a. Penilaian terhadap ketercapaian indikator SNP oleh setiap satuan pendidikan;
- b. Pemecahan masalah yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran; dan
- c. Peningkatan kinerja satuan PAUD melalui peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD.



PRINSIP SUPERVISI

Prinsip-prinsip yang perlu diterapkan oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi mutu satuan PAUD adalah sebagai berikut:

1. Ilmiah, artinya supervisi harus dilakukan dengan sistematis, teratur, terprogram, kontinyu, dan objektif;
2. Demokratis, artinya supervisor menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, dan mau menerima pendapat orang lain;
3. Kooperatif, supervisor dan pendidik /tenaga kependidikan dapat mengembangkan usaha bersama untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik, dan
4. Konstruktif dan Kreatif, artinya supervisor mampu membina pendidik dan tenaga kependidikan agar aktif dan berinisiatif dalam menciptakan situasi pendidikan yang lebih baik.



BAB II

METODE SUPERVISI

METODE DAN TEKNIK SUPERVISI

Metode dalam konteks pengawasan/supervisi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh supervisor guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh sistem perorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri, sedangkan teknik adalah langkah-langkah kongkrit yang dilaksanakan oleh seorang supervisor, dan teknik yang dilaksanakan dalam supervisi dapat ditempuh melalui berbagai cara, yakni pada prinsipnya berusaha merumuskan harapan-harapan menjadi sebuah kenyataan.

Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan serta masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Dalam supervisi dikenal dengan dua teknik besar, yakni teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual antara lain berupa (1) kunjungan dan observasi kelas (2) individual conference (3) kunjungan antar guru-guru (4) evaluasi diri (5) *supervisory bulletin* (6) *professional reading* (7) *professional writing*, sedangkan teknik kelompok antara lain (1) rapat staf sekolah (2) orientasi guru baru (3) *curriculum laboratory* (4) panitia (5) perpustakaan profesional (6) demonstrasi mengajar (7) lokakarya (8) *field trips for staff personnels* (9) *panel or forum discussion* (10) *in service training* dan (11) organisasi profesional.

Pada supervisi mutu satuan PAUD tahun 2021, menggunakan teknik evaluasi diri pada dalam bentuk supervisi online atau e-supervisi dengan link <https://paudikmasbanten.kemdikbud.go.id/supervisi> dan pendampingan yang dilakukan dengan teknik individu berupa kunjungan dan observasi langsung ke satuan PAUD, dan Dikusi terpumpun bersama kepala sekolah dan para guru.

WAKTU DAN TEMPAT SUPERVISI

Adapun waktu dan tempat supervisi yaitu:

1. Supervisi satuan PAUD tahun 2021 secara online dilaksanakan dari rentang tanggal 16 Juli s.d 6 Agustus 2021 berdasarkan surat edaran kepala BPPAUD dan Dikmas Provisi Banten kepada Kepala Dinas kab/kota se Provinsi Banten
2. Pendampingan satuan PAUD tahun 2021 dilakukan secara luring dengan kunjungan dan observasi ke satuan PAUD dari tanggal 4 Agustus s.d 16 September 2021 berdasarkan SK dan Surat Tugas Kepala BPPAUD dan Dikmas Provinsi Banten untuk para penilik dan pengawas sesuai dengan quota satuan PAUD di masing-masing kab/kota.

JENIS DATA DAN PERANGKAT SUPERVISI

Jenis Data

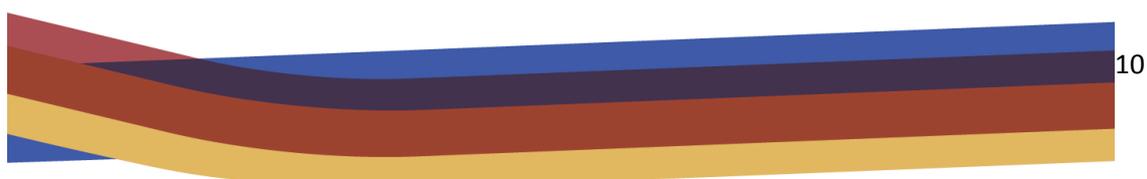
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait jenis data supervisi ini yaitu:

- a. Data harus spesifik sehingga mudah dapat menentukan jenis instrumen yang akan digunakan;
- b. Sumber data atau informasi harus baik jumlah maupun keragaannya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar menentukan isi, bahasa, sistematika instrumen pengumpulan data
- c. Jenis data jelas sehingga supervisor dapat memperkirakan cara analisis data guna pemecahan masalah supervisi pendidikan

Perangkat Supervisi

Adapun perangkat supervisi yang mendukung pelaksanaan supervisi mutu satuan PAUD tahun 2021 ini yaitu:

- a. Aplikasi supervisi berbasis web atau internet (supervisi online) berupa link supervisi dengan alamat <https://pauddikmasbanten.kemdikbud.go.id/supervisi>
- b. Panduan penggunaan supervisi online;
- c. Panduan pembuatan video dan cara pembuatan link googledrive;



- d. Link video pilot project untuk sampel video yang harus dibuat satuan PAUD
- e. Rubrik instrumen supervisi satuan PAUD; dan
- f. Rubrik instrumen video berbasis performance
- g. Format laporan per lembaga dan laporan akhir

TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Teknik Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2004: 158).

Teknik Komunikasi

Teknik komunikasi adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Dalam pelaksanaannya dapat dibedakan ke dalam dua cara, yaitu (1) teknik komunikasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan interview sebagai alatnya. Dan (2) teknik komunikasi secara tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan angket atau kuesioner sebagai alatnya (Margono, 2004: 165).

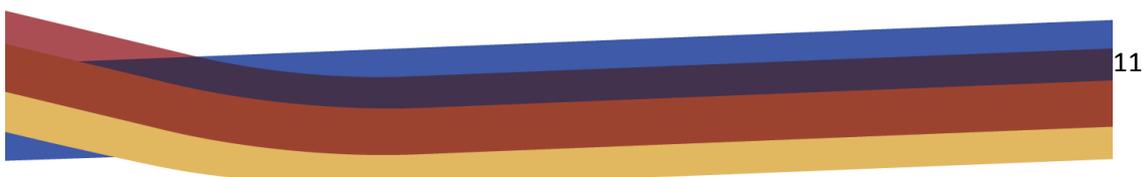
Dalam supervisi mutu satuan PAUD tahun 2021 ini menggunakan kedua teknik komunikasi yakni langsung, menggunakan interview dan tidak langsung menggunakan angket atau kuesioner.

Interview

Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Interview terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu interview berstruktur (menggunakan pedoman wawancara) dan interview tidak terstruktur (tidak menggunakan pedoman wawancara).

Angket atau Kuesioner

Kuesioner adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh responden. Kuesioner terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu:



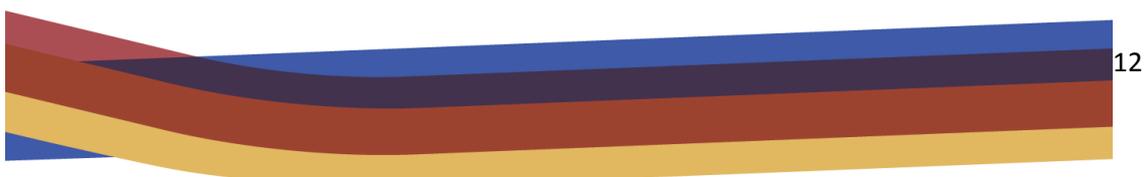
1. kuesioner berstruktur/tertutup, yaitu kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah alternatif jawaban yang disediakan. Responden dalam menjawab terikat pada sejumlah kemungkinan jawaban yang sudah disediakan
2. Kuesioner tak berstruktur/terbuka. Yaitu kuesioner di mana responden secara bebas menurut pendapatnya sendiri dalam menjawab setiap pertanyaan.
3. Kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur. Dalam angket ini, di satu pihak memberi alternatif jawaban yang harus dipilih dan di lain pihak memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab secara bebas lanjutan dari jawaban pertanyaan sebelumnya.
4. Kuesioner semi terbuka. Kuesioner ini memberikan kebebasan kemungkinan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia.

Teknik Pengukuran

Pada supervisi mutu satuan PAUD tahun 2021, teknik pengukuran yang digunakan adalah skala. Skala adalah seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subjek, objek atau tingkah laku dengan tujuan mengetahui sifat. Skala atau rating skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat skala. Walaupun bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu tentang program dan orang.

RESPONDEN

Adapun responden dalam supervisi mutu satuan PAUD tahun 2021 ini dapat digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 9: Data Responden supervisi Mutu satuan PAUD Kab/Kota se-Provinsi Banten

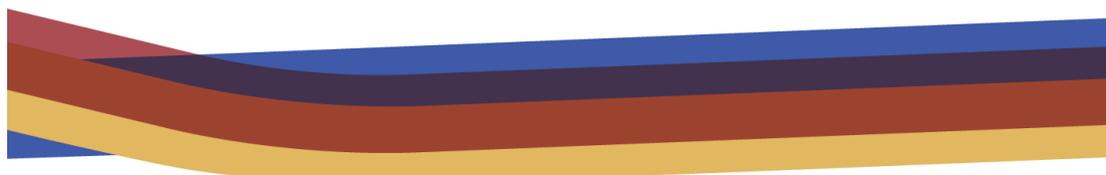
Kab/Kota	Supervisi Daring	Pengelola	Penilik/ Pengawas	Supervisi Luring
Kabupaten Tangerang	328	330	264	266
Kabupaten Serang	370	610	268	367
Kabupaten Pandeglang	272	320	236	272
Kabupaten Lebak	272	230	166	268
Kota Tangerang	288	290	296	283
Kota Tangerang Selatan	189	191	191	184
Kota Serang	176	182	193	172
Kota Cilegon	116	172	182	114
Total	2011	2325	1796	1920

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai responden supervisi mutu satuan PAUD tahun 2021 yaitu:

1. Supervisi online/daring (dalam jaringan) menjangkau total 2011 responden dari kab/kota se provinis Banten; terdiri dari:
 - a. Input isian oleh pengeola, total riil berjumlah 2325 responden; dan
 - b. Input penilaian oleh penilik/pengawas, total riil berjumlah 1796 responden;
2. Pendampingan (supervisi luring), menjangkau 1920 responden, berdasarkan ketersediaan pagu anggaran supervisi satuan PAUD di BPPAUD dan Dikmas Provinsi Banten.

TEKNIK ANALISIS DATA

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif diolah menggunakan statistik deskriptif. Analisis yang paling sederhana untuk menafsirkan data kuantitatif secara deskriptif ialah dengan cara menguji skor. Sedangkan analisis data kualitatif meliputi (1) reduksi data; (2) display data; dan (3) pengambilan kesimpulan dan verifikasi (Hadi dan Haryono, 2005: 61-62).



BAB III HASIL SUPERVISI

CAPAIAN 8 (DELAPAN) SNP

STPPA (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak)

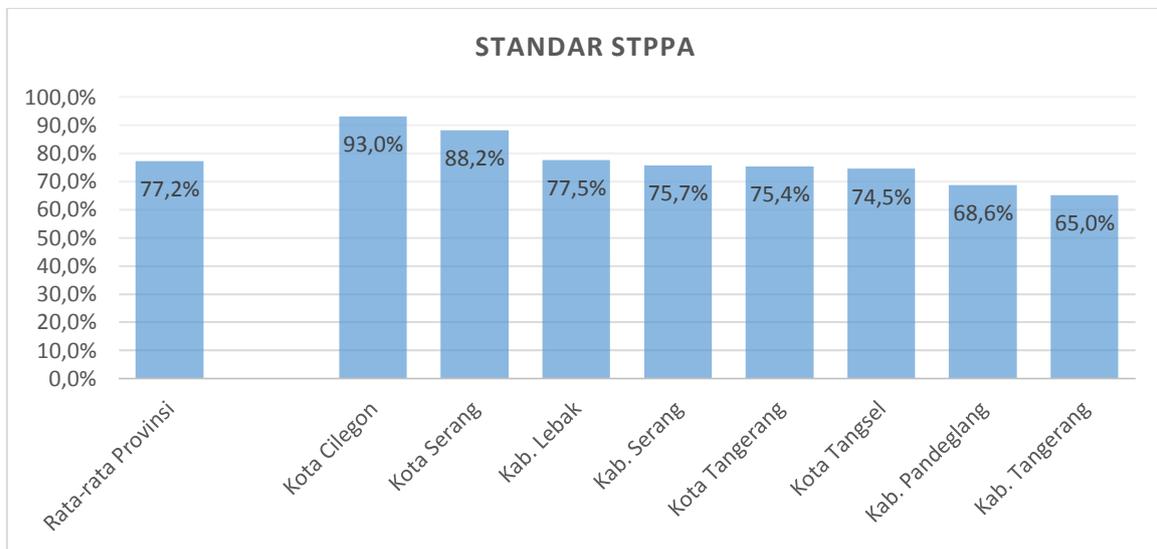
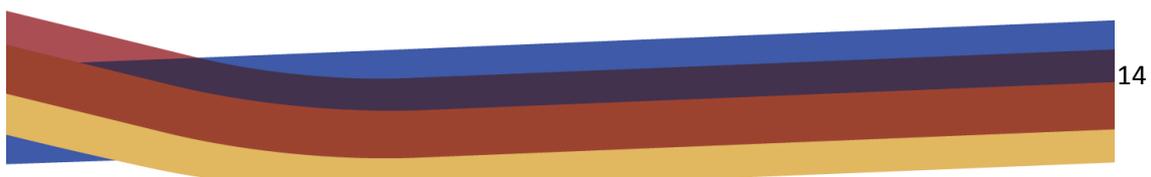


Diagram 1: Capaian STPPA (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak)

Dari diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian STPPA rata-rata provinsi sebesar 77,2 %. Jika dilihat dari data capaian STPPA di seluruh Kab. /Kota se Provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kb/kota yang memiliki nilai capaian STPPA lebih tinggi dari nilai capaian STPPA rata-rata provinsi yakni 1) Kota Cilegon dengan nilai capaian STPPA sebesar 93,0%; 2) Kota Serang dengan nilai capaian STPPA sebesar 88.2%; dan 3) Kab. Lebak dengan nilai capaian STPPA sebesar 77.5%. Selebihnya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai capaian STPPA lebih rendah dari nilai capaian STPPA rata-rata Provinsi diantaranya yaitu 1) Kab. Serang dengan nilai 75.7%; 2) Kota Tangerang dengan nilai 74.5%; 3) Kota Tangerang Selatan dengan nilai 74.5%; 4) Kab. Pandeglang dengan nilai 68.6%; dan 5) Kab. Tangerang dengan nilai 65.0%



Tabel 1: Capaian Nilai STPPA Per Indikator

Kab./Kota	Deteksi Pertumbuhan Anak	Deteksi Perkembangan Anak
Rata-rata Provinsi	78,4%	76,1%
Kota Cilegon	93,4%	92,6%
Kota Tangsel	88,8%	87,6%
Kab. Lebak	80,0%	75,0%
Kota Serang	75,4%	76,0%
Kota Tangerang	77,0%	73,7%
Kab. Tangerang	75,4%	73,5%
Kab. Pandeglang	70,0%	67,2%
Kab. Serang	67,0%	63,0%

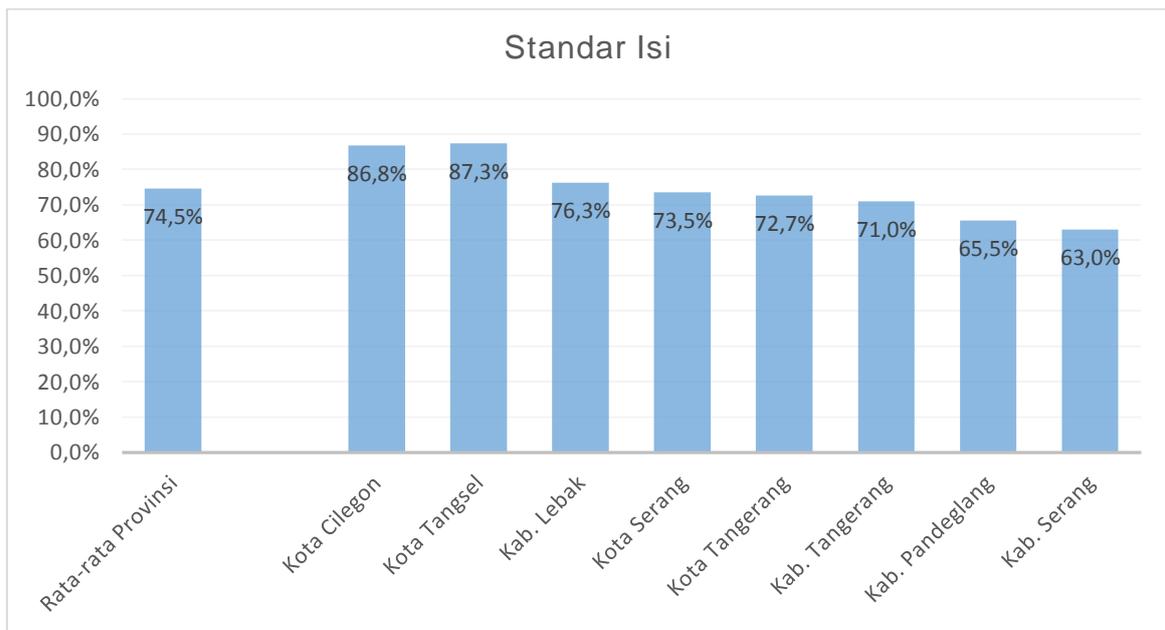
Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian nilai STPPA per-indikator meliputi 2 indikator yaitu 1) Deteksi pertumbuhan anak; dan 2) Deteksi perkembangan anak.

Pada indikator pertama, yakni indikator deteksi pertumbuhan anak, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 78,4%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator deteksi pertumbuhan anak se provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon, kota serang dan kab. Lebak. Sedangkan sisanya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu Kab. Serang, Kota tangerang, Kota Tangsel, Kab. Pandeglang, dan Kab. Tangerang.

Selanjutnya, pada indikator kedua, yakni indikator Deteksi Perkembangan anak, nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 76.1%. pada indikator ini juga sama terdapat 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari provinsi yakni Kota Cilegon, Kota Serang, dan kab. Lebak. Sedangkan sisanya yakni 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kab. Pandeglang, dan Kab. Tangerang.

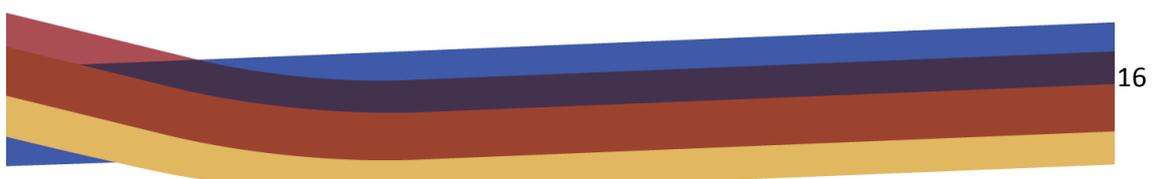


STANDAR ISI



Dari diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian Standar Isi rata-rata Provinsi sebesar 74.5%. Jika dilihat dari data capaian standar isi dari seluruh kab/kota se-Provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kab/kota yang memiliki nilai capaian standar isi lebih tinggi dari nilai capaian Standar isi rata-rata provinsi yakni 1) Kota Cilegon dengan nilai capain Standar isi sebesar 86,8%; 2) Kota Tangerang Selatan dengan nilai capaian Standar isi sebesar 87,3% dan 3) Kab. Lebak dengan nilai capaian Standar isi sebesar 76,3%.

Selebihnya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai capaian Standar isi lebih rendah dari nilai capaian Standar isi rata-rata Provinsi diantaranya yaitu 1) Kab. Serang dengan nilai 73.5%; 2) Kota Tangerang dengan nilai 72.7%; 3) Kab Tangerang dengan nilai 71, 0 %; 4) Kab. Pandeglang dengan nilai 65.5%; dan 5) Kab. Serang dengan nilai 63.0%.



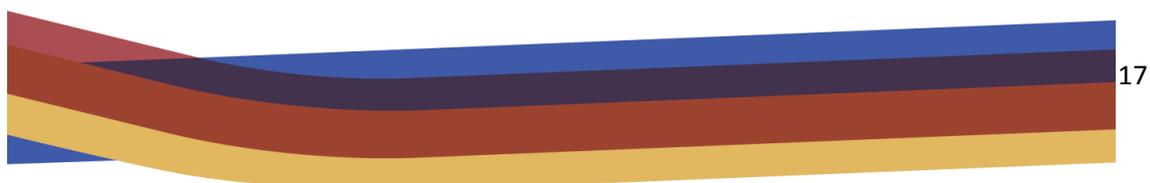
Kab./Kota	Dokumen KTSP	Acuan Kurikulum	Layanan Menurut Usia
Rata-rata Provinsi	78,7%	76,1%	76,9%
Kota Cilegon	93,9%	83,9%	87,6%
Kota Tangsel	87,8%	89,0%	89,3%
Kab. Lebak	78,3%	78,6%	76,4%
Kota Serang	76,2%	78,0%	76,0%
Kota Tangerang	75,3%	73,7%	75,3%
Kab. Tangerang	75,6%	76,5%	78,7%
Kab. Pandeglang	68,80%	65,0%	66,0%
Kab. Serang	74,0%	64,0%	66,0%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian nilai Standar Isi Per indikator meliputi 2 indikator yaitu 1) Dokumentasi KTSP; 2) Acuan Kurikulum; dan 3) Layanan Menurut Usia.

Pada indikator pertama, yakni indikator dokumentasi KTSP, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 78,7%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator dokumentasi KTSP se provinsi Banten, ternyata terdapat 2 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangsel. Sedangkan sisanya adalah 6 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu Kab. Lebak, Kota Serang, Kota tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang dan Kab Serang.

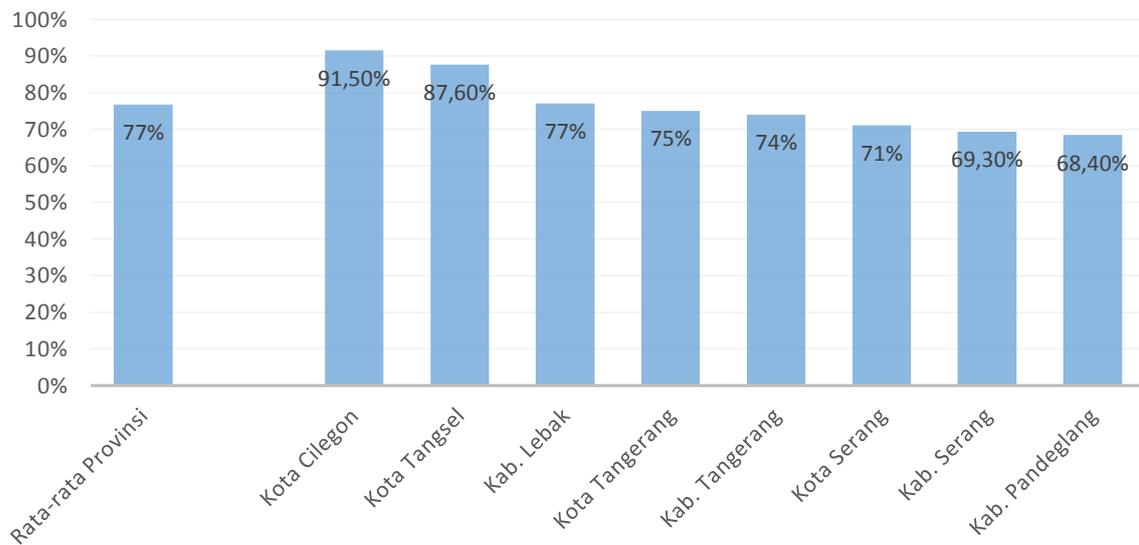
Selanjutnya, pada indikator kedua, yakni indikator Acuan Kurikulum, nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 76.1%. pada indikator ini juga sama terdapat 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari provinsi yakni kota Cilegon, kota Tangsel, kab. Lebak, kota Serang dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya yakni 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kota tangerang, kab. Pandeglag, dan kab. Serang.

Selanjutnya, pada indikator ketiga, yakni Layanan Menurut Usia, nilai rat-rata Provinsi yakni sebesar 76.9%. pada indikator ini juga terdapat 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari provinsi yakni kota Cilegon, kota Tangsel, dan kab. Tangerang.

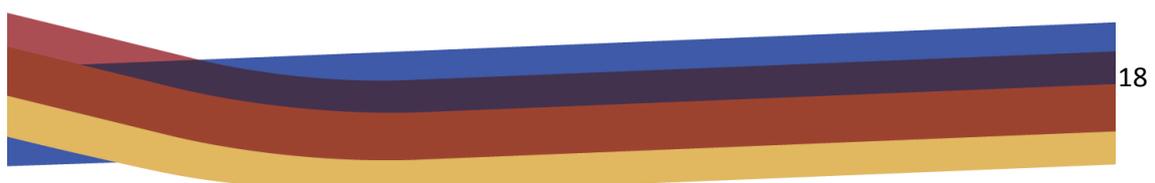


Sedangkan sisanya yakni 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kab. Lebak, kota Serang, kota Tangerang, kab. Pandeglang, kab. Serang.

STANDAR PROSES



Dari diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian Standar Proses rata-rata Provinsi sebesar 77%. Jika dilihat dari data capaian Standar Proses dari seluruh kab/kota se-Provinsi Banten, ternyata terdapat 2 kab/kota yang memiliki nilai capaian Standar Proses lebih tinggi dari nilai capaian Standar Proses rata-rata provinsi yakni 1) Kota Cilegon dengan nilai capain Standar Proses sebesar 91.50%; dan 2) Kota Tangerang Selatan dengan nilai capaian Standar Proses sebesar 87.60% dan terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai sama dengan nilai capaian Standar Proses rata-rata Provinsi yakni Kab. Lebak. Selebihnya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai capaian Standar Proses lebih rendah dari nilai capaian Standar isi rata-rata Provinsi diantaranya yaitu 1) Kota Tangerang dengan nilai 75%; 2) Kab. Tangerang dengan nilai 74%; 3) Kota Serang dengan nilai 71%; 4) Kab. Serang dengan nilai 69.30%; dan 5) Kab. Pandeglang dengan nilai 68.40%.

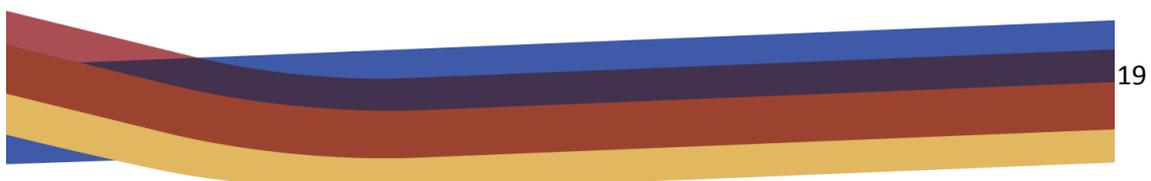


Tabel 3: Capaian Standar Proses Per Indikator

Kab./Kota	Pelaksanaan Pembelajaran	Prosem	RPPM	RPPH	Pelaksanaan Pembelajaran	Supervisi Pembelajaran	Keterlibatan Orang Tua
Rata-rata Provinsi	81%	81%	78%	82%	80%	72%	76%
Kota Cilegon	94,90%	95,2%	95,20%	95,2%	93,30%	86,30%	86,30%
Kota Tangsel	91%	90,5%	90,50%	90,6%	89%	82%	86,40%
Kab. Lebak	79%	79%	79,60%	80%	76,80%	74%	75%
Kota Tangerang	78%	81%	80,50%	80%	77%	66%	71,70%
Kab. Tangerang	80,20%	77,5%	78,90%	80%	80,70%	73,60%	78%
Kota Serang	76%	76,3%	77,20%	78,8%	75,20%	67,60%	70,20%
Kab. Serang	75%	76%	76,50%	76%	73,70%	66,80%	71,50%
Kab. Pandeglang	71,60%	69,8%	70,50%	71,6%	71,40%	63%	67,60%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian nilai Standar Isi Per indikator meliputi 7 indikator yaitu 1) Pelaksanaan Pembelajaran; 2) Prosem; 3) RPPM; 4) RPPH; 5) Pelaksanaan Pembelajaran; 6) Supervisi Pembelajaran; 7) Keterlibatan Orang tua.

Pada indikator pertama, yakni indikator pelaksanaan pembelajaran, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 81%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator pelaksanaan pembelajaran se provinsi Banten, ternyata terdapat 2 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon dan Kota Tangsel. Sedangkan sisanya adalah 6 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kab. Lebak, kota tangerang, kab. Tangerang, kab Serang, kota Serang dan kab. Pandeglang.



Selanjutnya, pada indikator kedua, yakni indikator Prosem, nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 81%. pada indikator ini juga sama terdapat 2 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari provinsi yakni kota Cilegon dan kota Tangsel. Terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai sama dengan nilai rata-rata provinsi yakni kota Tangerang. Sedangkan sisanya yakni 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, kab. Lebak, kab. Tangerang, kab Serang, kota Serang dan kab. Pandeglang.

Selanjutnya, pada indikator ketiga, yakni RPPM, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 78%. pada indikator ini juga terdapat 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari provinsi yakni kota Cilegon, kota Tangsel, kab. Lebak, kota Tangerang dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya yakni 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kota Serang, kab. Serang, dan kab. Pandeglang.

Selanjutnya pada indikator keempat, yakni indikator RPPH, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 82%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator pelaksanaan pembelajaran se provinsi Banten, ternyata terdapat 2 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon dan Kota Tangsel. Sedangkan sisanya adalah 6 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kab. Lebak, kota tangerang, kab. Tangerang, kab Serang, kota Serang dan kab. Pandeglang.

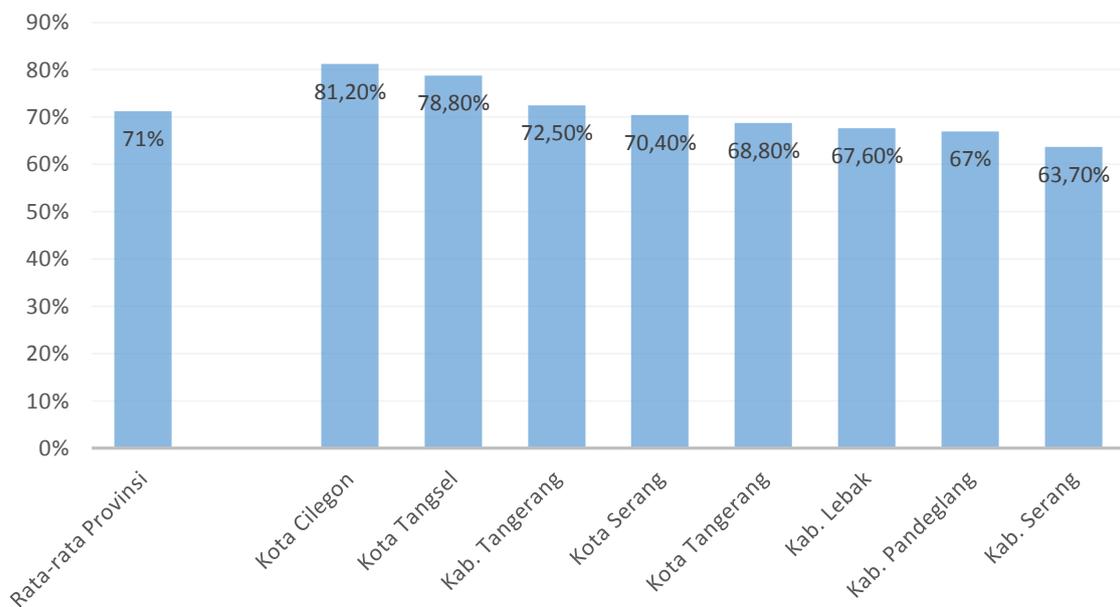
Selanjutnya pada indikator kelima, yakni indikator Pelaksanaan Pembelajaran, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 80%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator pelaksanaan pembelajaran se provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon, Kota Tangsel dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kab. Lebak, kab. Tangerang, kab Serang, kota Serang dan kab. Pandeglang.

Selanjutnya pada indikator keenam, yakni indikator Supervisi Pembelajaran, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 72%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator pelaksanaan pembelajaran se provinsi Banten, ternyata terdapat 4 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon, Kota Tangsel, kab. Lebak dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya adalah 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kota Tangerang, kab Serang, kota Serang dan kab. Pandeglang.

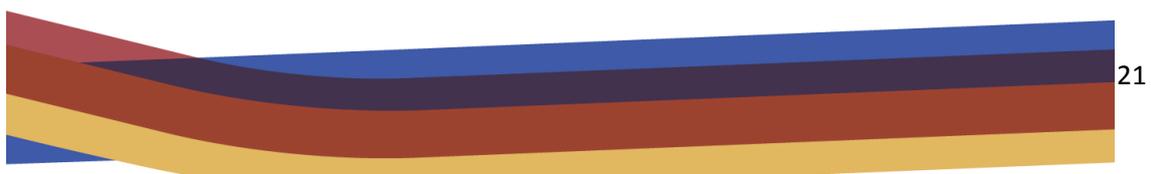


Selanjutnya pada indikator ketujuh, yakni indikator Keterlibatan Orang tua, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 76%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator pelaksanaan pembelajaran se provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon, Kota Tangsel, dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kab. Lebak, kota Tangerang, kab Serang, kota Serang dan kab. Pandeglang.

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Dari diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian PTK rata-rata provinsi sebesar 71%. Jika dilihat dari data capaian PTK di seluruh kab./kota se provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kb/kota yang memiliki nilai capaian PTK lebih tinggi dari nilai capaian PTK rata-rata provinsi yakni 1) Kota Cilegon dengan nilai capaian PTK sebesar 81.20%; 2) Kota Tangerang Selatan dengan nilai capaian PTK sebesar 78.80%; dan 3) Kab. Tangerang dengan nilai capaian PTK sebesar 72.50%. Selebihnya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai capaian PTK lebih rendah dari nilai capaian PTK rata-rata Provinsi diantaranya yaitu 1) Kota. Serang dengan nilai 70.40%; 2) Kota Tangerang dengan nilai 68.80%; 3) Kab. Lebak dengan nilai 67.60%; 4) Kab. Pandeglang dengan nilai 67%; dan 5) Kab. Serang dengan nilai 63.70%.



Pada indikator pertama, yakni indikator kualifikasi akademik penididik, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 76%. Jika dilihat dari seluruh capaian indiktor kualifikasi akademik penididik se provinsi Banten, ternyata terdapat 2 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon, dan kota Tangerang Selatan. Dan terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai yang sama dengan nilai rata-rata Provinsi yaitu Kab.Tangerang. Sedangkan sisanya adalah 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kota. Serang, kota tangerang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

Pada indikator kedua, yakni indikator Kualifikasi Kompetensi Pendidik, dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 74%. Pada indikator ini terdapat 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari provinsi yakni kota Cilegon, kotaTangerang Selatan, dan kab. Tangerang. Dan terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai yang sama dengan nilai rata-rata Provinsi yaitu kab. Lebak. Sedangkan sisanya yakni 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kota Serang, kota tangerang, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

Pada indikator ketiga, yakni indikator Kualifikasi Akademik Pengelola, dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 77%. Pada indikator ini terdapat 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi yakni kota Cilegon, kotaTangerang Selatan, kab. Tangerang dan kota Serang. Sedangkan sisanya yakni 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, Kota tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, dan Kab. Serang.

Selanjutnya pada indikator keempat, yakni indikator Kualifikasi Kompetensi Pengelola, dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 77%. Pada indikator ini terdapat 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi yakni kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan kota Serang. Terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai yang sama dengan nilai rata-rata Provinsi yaitu kab. Tangerang. Sedangkan sisanya yakni 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, kota tangerang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

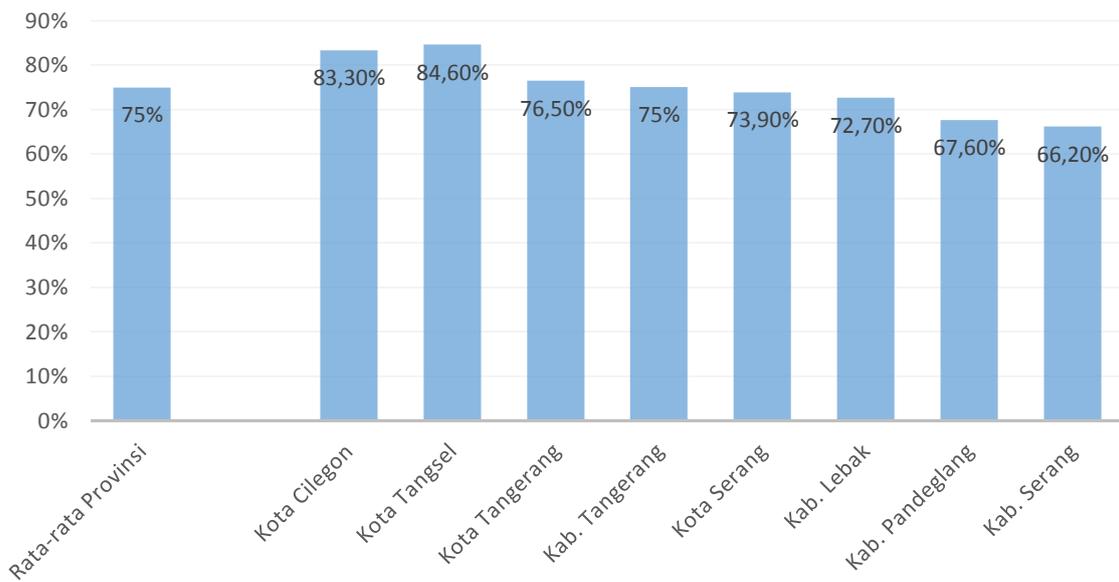
Pada indikator kelima, yakni indikator Kualifikasi AkademikTenaga Kependidikan, dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 72%. Pada indikator ini terdapat 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi yakni kota Cilegon, kotaTangerang Selatan, dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya yakni 5 kab/kota yang memiliki nilai



lebih rendah dari provinsi yaitu, kota Serang, kota tangerang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

Selanjutnya pada indikator keenam, yakni indikator Kualifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan, dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 71%. Pada indikator ini terdapat 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi yakni kota Cilegon, kotaTangerang Selatan, dan kab. Tangerang. Dan terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai yang sama dengan nilai rata-rata Provinsi yaitu kota Tangerang. Sedangkan sisanya yakni 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, kota Serang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA



Dari diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian SARPRAS rata-rata provinsi sebesar 75%. Jika dilihat dari data capain SARPRAS di seluruh kab./kota se provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kb/kota yang memiliki nilai capaian SARPRAS lebih tinggi dari nilai capaian SARPRAS rata-rata provinsi yakni 1) Kota Cilegon dengan nilai capaian SARPRAS sebsar 83.30%; 2) Kota Tangerang Selatan dengan nilai capaian SARPRAS sebesar 84.60%; dan 3) Kota. Tangerang dengan nilai capaian SARPRAS sebesar 76.50%. Dan terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai yang sama dengan nilai capaian SARPRAS rata-rata provinsi yakni 1) Kab. Tangerang dengan nilai 75%. Selebihnya adalah 4 kab/kota yang memiliki nilai capaian SARPRAS lebih rendah dari nilai capaian SARPRAS rata-rata Provinsi diantaranya yaitu 1) Kota. Serang dengan

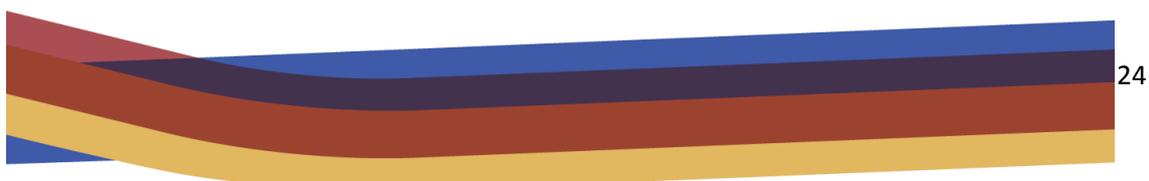


nilai 73.90%; 2) Kab. Lebak dengan nilai 72.70%; 3) Kab. Pandeglang dengan nilai 67.60%; 4) dan Kab. Serang dengan nilai 66.20%.

Kab./Kota	Sarana Pendidikan	Sarana Pembelajaran	Prasarana - Instalasi	Prasarana - Luas Lahan	Prasarana - Gedung	Prasarana - Halaman Bermain	Prasarana - Status Lahan
Rata-rata Provinsi	78%	78%	79%	75%	76%	75%	76%
Kota Cilegon	85,60%	86,30%	89%	79,80%	83%	82%	83%
Kota Tangsel	85%	84,80%	86,30%	84%	84,40%	83%	86,90%
Kota Tangerang	78,50%	78,40%	81%	73,30%	76,50%	74,40%	75,30%
Kab. Tangerang	78,50%	79,30%	78,60%	75%	77,20%	77,30%	77%
Kota Serang	78%	78,80%	79,80%	77,20%	74,40%	76,80%	73,90%
Kab. Lebak	75,80%	75%	74,70%	73,30%	74%	72%	73,30%
Kab. Pandeglang	70,20%	70,70%	71%	67,90%	68,30%	66,60%	68,20%
Kab. Serang	71,30%	71%	71%	69,80%	69,50%	68,60%	69,20%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Standar Sarpras (Sarana Dan Prasarana) Per indikator meliputi 7 indikator yaitu 1) Sarana Pendidikan; 2) Sarana Pembelajaran; 3) Prasarana Instalasi; 4) Prasarana Luas; 5) Prasarana Gedung; 6) Prasarana Halaman Bermain dan 7) Prasarana Status Lahan.

Pada indikator pertama, yakni indikator sarana pendidikan, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 78%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator sarana pendidikan se provinsi Banten, ternyata terdapat 4 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon, kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, dan Kab. Tangerang. Dan



terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai yang sama dengan nilai rata-rata Provinsi yaitu kota Serang. Sedangkan sisanya adalah 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

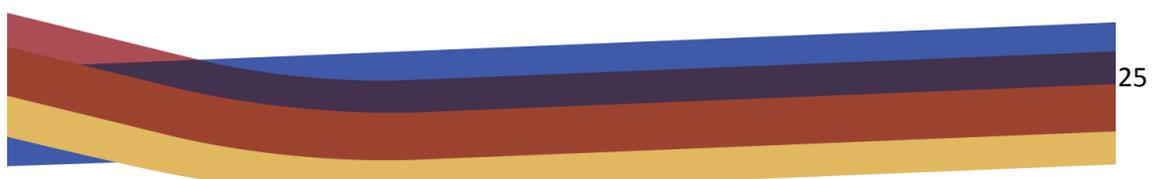
Pada indikator kedua, yakni indikator sarana pembelajaran, dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 78%. Pada indikator ini terdapat 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari provinsi yakni Kota Cilegon, kota Tangerang Selatan, kab. Tangerang, kab. Tangerang, dan kota Serang. Sedangkan sisanya yakni 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

Pada indikator ketiga, yakni indikator Prasarana instalasi, dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 79%. Pada indikator ini terdapat 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi yakni kota Cilegon, kotaTangerang Selatan, kota Tangerang dan kota Serang. Sedangkan sisanya yakni 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, kab. Tangerang, kota Serang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

Selanjutnya pada indikator keempat, yakni indikator prasarana luas, dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 75%. Pada indikator ini terdapat 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi yakni kota Cilegon, kotaTangerang Selatan, dan kota Serang. Dan terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai yang sama dengan nilai rata-rata Provinsi yaitu kab. Tangerang. Sedangkan sisanya yakni 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, kota tangerang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

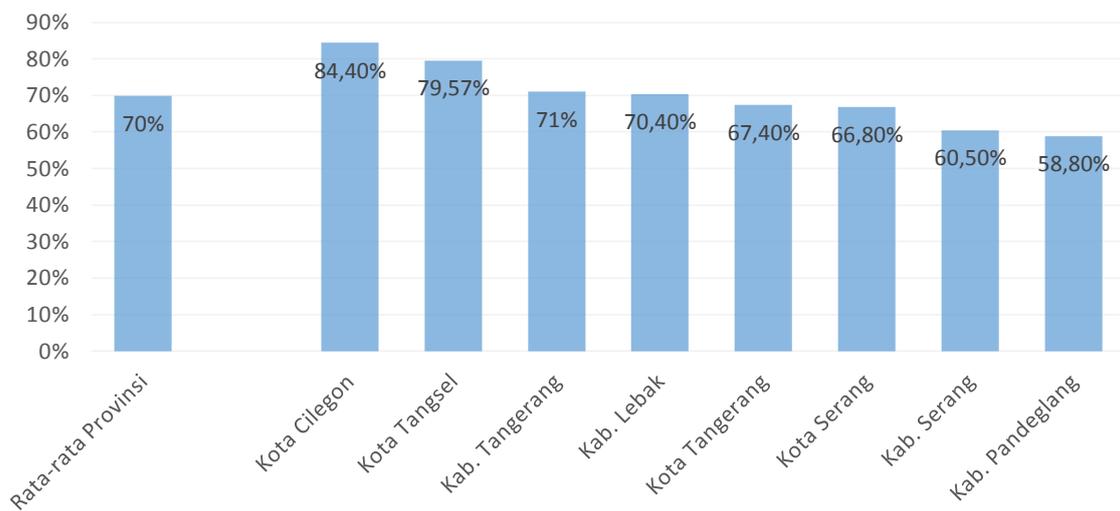
Pada indikator kelima, yakni indikator prasarana gedung, dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 76%. Pada indikator ini terdapat 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi yakni kota Cilegon, kotaTangerang Selatan, kota Tangerang dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya yakni 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, kota Serang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

Pada indikator keenam, yakni indikator prasarana halaman bermain dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 75%. Pada indikator ini terdapat 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi yakni kota Cilegon, kotaTangerang Selatan, kab. Tangerang dan kota Serang. Sedangkan sisanya yakni 4 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, Kota Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, dan kab. Serang.



Selanjutnya pada indikator ketujuh, yakni indikator prasarana status lahan dengan nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 76%. Pada indikator ini terdapat 3 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari Provinsi yakni kota Cilegon, kotaTangerang Selatan, dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya yakni 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, kota Tangerang, kab. Tangerang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang.

STANDAR PENGELOLAAN



Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa capaian SNP standar pengelolaan rata-rata provinsi sebesar 70%. Jika dilihat dari data capaian standar pengelolaan di seluruh kab/kota se-Provinsi Banten terdapat 3 (tiga) kab/kota yang memiliki nilai capaian standar pengelolaan lebih tinggi dari nilai rata-rata provinsi yaitu 1) Kota Cilegon dengan nilai capaian sebesar 84,40%; 2) Kota Tangerang Selatan dengan nilai capaian sebesar 79,57%; dan 3) Kab. Tangerang dengan nilai capaian sebesar 71%. Sedangkan 5 kab/kota lainnya memiliki nilai capaian standar pengelolaan di bawah nilai rata-rata provinsi antara lain 1) Kab. Lebak dengan nilai capaian sebesar 70,40%; 2) Kota Tangerang dengan nilai capaian sebesar 67,40%; 3) Kota Serang dengan nilai capaian sebesar 66,80%; 4) Kab. Serang dengan nilai capaian sebesar 60,50%; dan 5) Kab. Pandeglang dengan nilai capaian sebesar 58,80%.



Kab./Kota	Perencanaan Satuan	Pengorganisasian	Pelaksanaan	Pengawasan/Supervisi	Supervisi Kepala Sekolah	Program Keterlibatan Orang Tua
Rata-rata Provinsi	75%	74%	74%	70%	69%	74%
Kota Cilegon	90,70%	90,20%	89,90%	85%	81,40%	84,30%
Kota Tangsel	83,30%	81,50%	82,80%	75,70%	77%	80,80%
Kab. Tangerang	77%	75%	77,20%	72%	73%	77%
Kab. Lebak	71,50%	70%	71%	72,20%	72,20%	74%
Kota Tangerang	73,90%	74,30%	72,50%	67%	63%	71,30%
Kota Serang	70,50%	69,50%	72,50%	68,20%	66,90%	70,70%
Kab. Serang	67,50%	67%	67,70%	62%	61%	70%
Kab. Pandeglang	63%	62%	62%	57%	58,60%	63%

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian standar pengelolaan per indikator meliputi 6 (enam) indikator yaitu 1) Perencanaan Satuan; 2) Pengorganisasian; 3) Pelaksanaan; 4) Pengawasan/Supervisi; 5) Supervisi Kepala Sekolah; 6) Program Keterlibatan Orang tua.

Pada indikator pertama, yakni indikator perencanaan satuan memiliki nilai rata-rata provinsi sebesar 75%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator perencanaan satuan se-Provinsi Banten terdapat 3 (empat) kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata provinsi yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kab. Tangerang. Sedangkan 5 (lima) kab/kota lainnya memiliki nilai pencapaian lebih rendah dari nilai rata-rata provinsi di antaranya Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kota Serang, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang.

Pada indikator kedua yaitu pengorganisasian memiliki nilai rata-rata provinsi sebesar 74%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator pengorganisasian se-Provinsi Banten terdapat 4 (empat) kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata provinsi yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang dan Kota



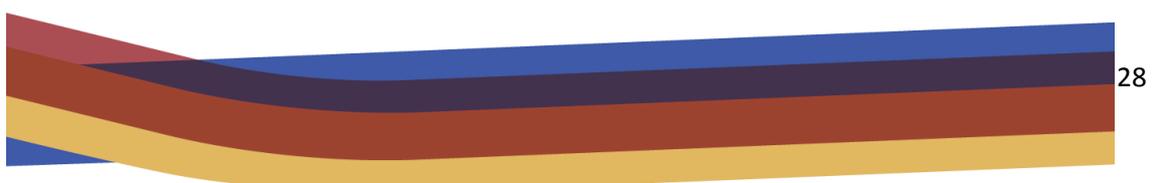
Tangerang. Sedangkan 4 (empat) kab/kota lainnya memperoleh nilai lebih rendah dari nilai rata-rata provinsi antara lain Kab. Lebak, Kota Serang, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang.

Selanjutnya pada indikator ketiga yaitu pelaksanaan memiliki nilai rata-rata provinsi sebesar 74%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator pelaksanaan se-Provinsi Banten terdapat 3 (tiga) kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari rata-rata provinsi yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kab. Tangerang. Sedangkan 5 (lima) kab/kota lainnya memperoleh nilai lebih rendah dari nilai rata-rata provinsi yakni Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kota Serang, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang.

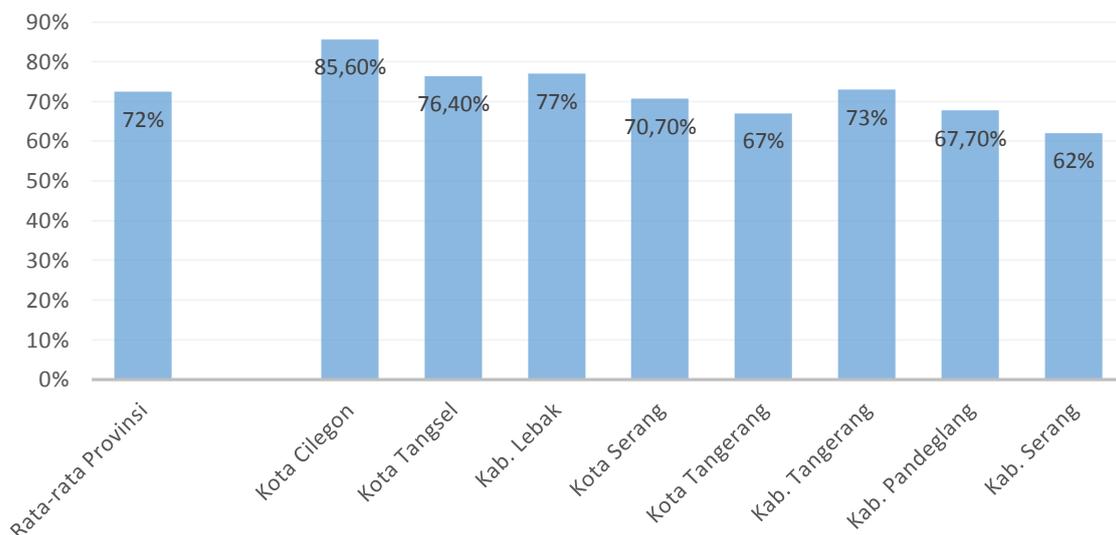
Pada indikator keempat yaitu Pengawasan/Supervisi memiliki nilai rata-rata provinsi sebesar 70%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator pengawasan/supervisi se-Provinsi Banten terdapat 4 (empat) kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari capaian rata-rata provinsi antara lain Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang dan Kab. Lebak. sedangkan 4 (empat) kab/kota lainnya memperoleh nilai lebih rendah dari nilai rata-rata provinsi yaitu Kota Tangerang, Kota Serang, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang.

Pada indikator kelima yaitu supervisi kepala sekolah memiliki nilai rata-rata provinsi sebesar 69%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator supervisi kepala sekolah terdapat 4 (empat) kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari capaian rata-rata provinsi yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang dan Kab. Lebak. Sedangkan 4 (empat) kab/kota lainnya memperoleh nilai lebih rendah dari capaian rata-rata provinsi yaitu Kota Tangerang, Kota Serang, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang.

Pada indikator keenam yaitu program keterlibatan orang tua memiliki nilai rata-rata provinsi sebesar 74%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator program keterlibatan orangtua terdapat 3 (tiga) kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari capaian rata-rata provinsi yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kab. Tangerang. Adapun Kab. Lebak memperoleh nilai sama dengan nilai capaian rata-rata provinsi. Sedangkan 4 (empat) kab/kota lainnya memperoleh nilai lebih rendah dari capaian rata-rata provinsi yaitu Kota Tangerang, Kota Serang, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang.

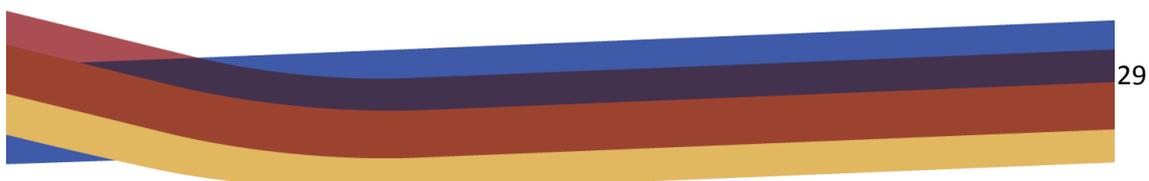


STANDAR PEMBIAYAAN



Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Standar Pembiayaan rata-rata provinsi sebesar 72%. Jika dilihat dari data capaian standar pembiayaan di seluruh kab/kota se-Provinsi Banten terdapat 4 (empat) kab/kota yang memiliki nilai capaian standar pembiayaan lebih tinggi dari nilai rata-rata provinsi yaitu 1) Kota Cilegon dengan nilai capaian sebesar 85,60%; 2) Kota Tangerang Selatan dengan nilai capaian sebesar 76,40%; 3) Kab. Lebak dengan nilai capaian sebesar 77%; 4) Kab. Tangerang dengan nilai 73%.

Kab./Kota	Pembiayaan Satuan PAUD	Administrasi Keuangan	Laporan Keuangan
Rata-rata Provinsi	78%	77%	78%
Kota Cilegon	86,80%	86,90%	88,10%
Kota Tangsel	83,80%	81,70%	83%
Kab. Lebak	77,50%	77%	78%
Kota Serang	78,40%	78,60%	79%
Kota Tangerang	77,70%	76,30%	75,70%
Kab. Tangerang	78%	74%	76%
Kab. Pandeglang	67,60%	69%	69,50%
Kab. Serang	71%	69%	71%

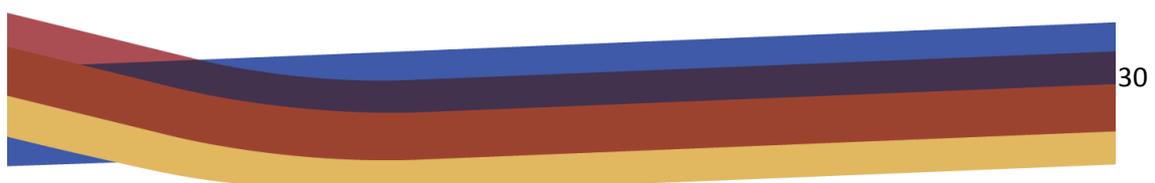


Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian standar pembiayaan per indikator meliputi 3 (tiga) indikator yaitu 1) Pembiayaan Satuan PAUD; 2) Administrasi Keuangan dan 3) Laporan Keuangan.

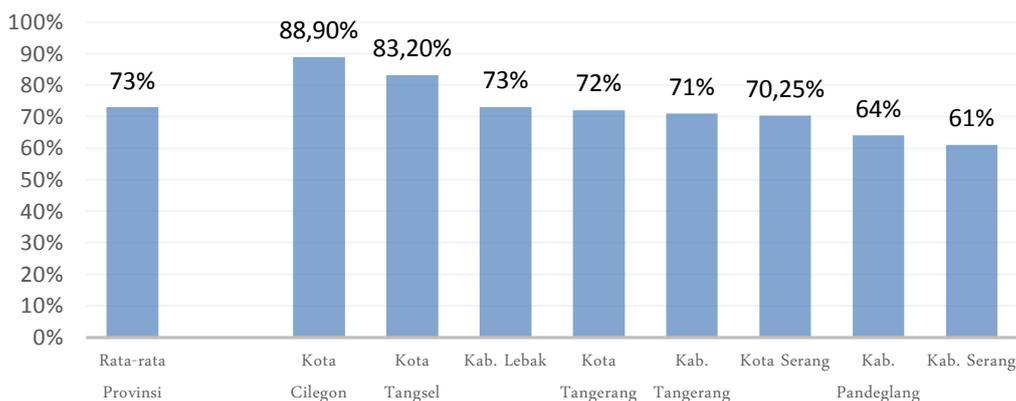
Pada indikator pertama, yakni indikator pembiayaan satuan PAUD memiliki nilai rata-rata provinsi sebesar 78%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator Pembiayaan Satuan PAUD se-Provinsi Banten terdapat 3 (tiga) kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata provinsi yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Adapun Kab. Tangerang memperoleh nilai yang sama dengan nilai capaian rata-rata provinsi. Sedangkan 4 (empat) kab/kota lainnya memiliki nilai pencapaian lebih rendah dari nilai rata-rata provinsi di antaranya Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang.

Pada indikator kedua, yakni administrasi keuangan memiliki nilai rata-rata provinsi sebesar 77%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator administrasi keuangan se-Provinsi Banten terdapat 4 (empat) kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata provinsi yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kab. Lebak dan Kota Serang. Sedangkan 4 (empat) kab/kota lainnya memiliki nilai pencapaian lebih rendah dari nilai rata-rata provinsi di antaranya Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang.

Pada indikator ketiga, yakni laporan keuangan memiliki nilai rata-rata provinsi sebesar 78%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator laporan keuangan se-Provinsi Banten terdapat 3 (tiga) kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata provinsi yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang. Adapun Kab. Lebak memperoleh nilai yang sama dengan capaian rata-rata provinsi. Sedangkan 4 (empat) kab/kota lainnya memiliki nilai pencapaian lebih rendah dari nilai rata-rata provinsi di antaranya Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang.

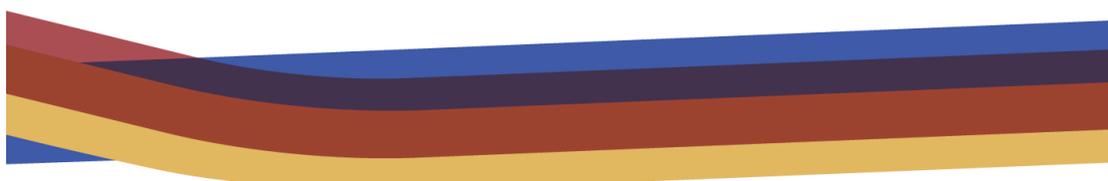


STANDAR PENILAIAN



Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian Standar Penilaian rata-rata provinsi sebesar 73%. Jika dilihat dari data capaian standar penilaian di seluruh kab/kota se-Provinsi Banten terdapat 2 Kab/Kota yang memiliki nilai capaian lebih tinggi dari rata-rata provinsi antara lain 1) Kota Cilegon dengan nilai 88,90%; 2) Kota Tangerang Selatan dengan nilai 83,20%. Adapun Kab. Lebak memiliki nilai capaian sama dengan nilai rata-rata provinsi sebesar 73%. Sedangkan 5 Kab/Kota lainnya memiliki nilai lebih rendah dari capaian rata-rata provinsi antara lain 1) Kota Tangerang dengan nilai 72%; 2) Kab. Tangerang dengan nilai 71%; 3) Kota Serang dengan nilai 70,25%; 4) Kab. Pandeglang dengan nilai 64%; dan 5) Kab. Serang 61%.

Kab./Kota	Perencanaan Penilaian Perkembangan Anak	Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Anak	Penerapan Prinsip Penilaian	Pelaporan Hasil Penilaian Perkembangan Anak
Rata-rata Provinsi	75%	75%	72%	77%
Kota Cilegon	89,90%	90,60%	87,30%	91,30%
Kota Tangsel	84%	84,80%	81,70%	84,80%
Kab. Lebak	74,80%	74%	71%	75,90%
Kota Tangerang	74%	73%	70,20%	76%
Kab. Tangerang	76,50%	77%	70,70%	75,80%
Kota Serang	73,50%	73,50%	72%	75,50%
Kab. Pandeglang	64%	64,70%	63%	67,60%
Kab. Serang	64%	64,40%	63%	66,40%



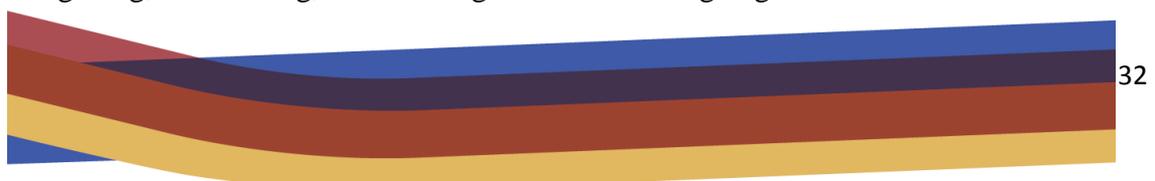
Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian nilai Standar Isi Per indikator meliputi 4 indikator yaitu 1) Perencanaan Penilaian Perkembangan Anak; 2) Pelaksanaan Penilaian Perkembangan Anak; 3) Penerapan Prinsip Penilaian; 4) Pelaporan Hasil Penilaian Perkembangan Anak.

Pada indikator pertama, yakni indikator Perencanaan Penilaian Perkembangan Anak, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 75%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator Perencanaan Penilaian Perkembangan se provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon, kota Tangsel dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kab. Lebak, kota tangerang, kab Serang, kota Serang dan kab. Pandeglang.

Selanjutnya pada indikator kedua, yakni indikator Perencanaan Penilaian Perkembangan, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 75%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator Perencanaan Penilaian Perkembangan se provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon, kota Tangsel dan kab. Tangerang. Sedangkan sisanya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu kab. Lebak, kota tangerang, kab Serang, kota Serang dan kab. Pandeglang.

Selanjutnya, pada indikator ketiga, yakni indikator Penerapan Prinsip Penilaian, nilai rata-rata provinsi yakni sebesar 72%. pada indikator ini juga sama terdapat 2 kab/kota yang memiliki nilai lebih tinggi dari provinsi yakni kota Cilegon dan kota Tangsel. Terdapat 1 kab/kota yang memiliki nilai sama dengan nilai rata-rata provinsi yakni kota Serang. Sedangkan sisanya yakni 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu, kab. Lebak, kota Tangerang, kab. Tangerang, kab Serang, dan kab. Pandeglang.

Selanjutnya pada indikator keempat, yakni indikator Pelaporan Hasil Penilaian Perkembangan Anak, nilai rata-rata Provinsi yakni sebesar 77%. Jika dilihat dari seluruh capaian indikator Pelaporan Hasil Penilaian Perkembangan Anak se provinsi Banten, ternyata terdapat 3 kab/kota yang memperoleh nilai lebih tinggi dari provinsi yaitu kota Cilegon, kota Tangsel dan kota Tangerang. Sedangkan sisanya adalah 5 kab/kota yang memiliki nilai lebih rendah dari provinsi yaitu Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kab Serang, Kota Serang dan Kab. Pandeglang.



CAPAIAN PERFORMANCE

Komponen Performance Pengelolaan/Kelembagaan

No	Komponen Performance	Kab./Kota							
		Kab. Lebak	Kab. Pandeglang	Kab. Serang	Kab. Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kota Tangerang	Kota Tangsel
1	SDM [Guru]	3,9	3,7	3,8	4,1	4,7	4,1	4,0	4,6
2	SDM [Tenaga Adm.)	3,9	3,6	3,8	4,0	4,6	4,0	4,0	4,3
3	SDM [Orang Tua]	3,3	3,3	3,5	3,7	4,3	3,6	3,6	3,9
4	Material	3,6	3,3	3,4	3,8	4,3	3,7	3,7	4,2
5	Metode	3,4	3,2	3,3	3,7	4,1	3,5	3,6	4,0
6	Materi	3,7	3,4	3,5	3,8	4,3	3,7	3,7	4,2
7	Alat (TIK)	3,6	3,2	3,4	4,1	4,5	4,0	3,9	4,3
	summary performance	3,6	3,4	3,5	3,9	4,4	3,8	3,8	4,2

Keterangan:

Skala nilai 4 s.d 4,9 = performance sangat tinggi

Skala nilai 3 s.3,9 = performance tinggi

Skala nilai 2 s.d 2,9 = performance rendah

Skala nilai 1 s.d 1,9 = performance sangat rendah

Dapat dijelaskan dari data pada tabel di atas, bahwa performance pengelolaan/kelembagaan yang meliputi SDM (guru), SM (administrasi, Material, Metode, Materi dan alat /TIK, dengan nilai sangat tinggi dimiliki oleh Kota Cilegon



dengan nilai 4,4 dan Kota Tangerang Selatan dengan nilai 4,2. Sedangkan kab./kota dengan performance tinggi berturut-turut dimiliki oleh kab. Tangerang dengan nilai 3,9; kota Serang dengan nilai 3,8; kota Tangerang dengan nilai 3,8; kab. Lebak dengan nilai 3,6; kab. Serang dengan nilai 3,5; dan kab. Pandeglang dengan nilai 3,4. Performance rendah dan sangat rendah nihil.

Komponen Performance Pembelajaran

No	Komponen Performance	Kab./Kota							
		Kab. Lebak	Kab. Pandeglang	Kab. Serang	Kab. Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kota Tangerang	Kota Tangerang Selatan
1	Sarpras	3,5	3,2	3,4	3,9	4,3	3,6	3,7	4,1
2	Penyambutan	3,9	3,7	3,7	4,1	4,6	4,1	4,1	4,5
3	Pembukaan	3,7	3,6	3,4	3,9	4,5	3,8	3,8	4,4
4	Kegiatan Inti	3,7	3,5	3,5	3,9	4,5	3,8	3,7	4,2
5	Penutupan	3,5	3,3	3,4	3,8	4,4	3,5	3,7	4,0
	summary performance	3,6	3,4	3,5	3,9	4,4	3,8	3,8	4,2

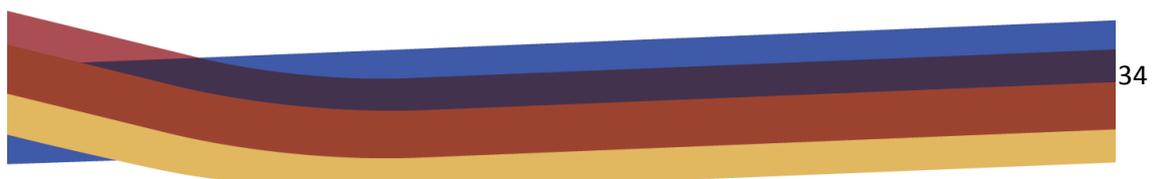
Keterangan:

Skala nilai 4 s.d 4,9 = performance sangat tinggi

Skala nilai 3 s.d 3,9 = performance tinggi

Skala nilai 2 s.d 2,9 = performance rendah

Skala nilai 1 s.d 1,9 = performance sangat rendah



Dapat dijelaskan dari data pada tabel di atas, bahwa performance pembelajaran yang meliputi tampilan sarpas, penyambutan, pembukaan, kegiatan inti dan penutupan, dengan nilai sangat tinggi dimiliki oleh Kota Cilegon dengan nilai 4,5 dan Kota Tangerang Selatan dengan nilai 4,3. Sedangkan kab./kota dengan performance tinggi berturut-turut dimiliki oleh kab. Tangerang dengan nilai 3,9; kota Serang dengan nilai 3,8; kota Tangerang dengan nilai 3,8; kab. Lebak dengan nilai 3,6; kab. Serang dengan nilai 3,5; dan kab Pandeglang dengan nilai 3,5. Performance rendah dan sangat rendah Nihil.

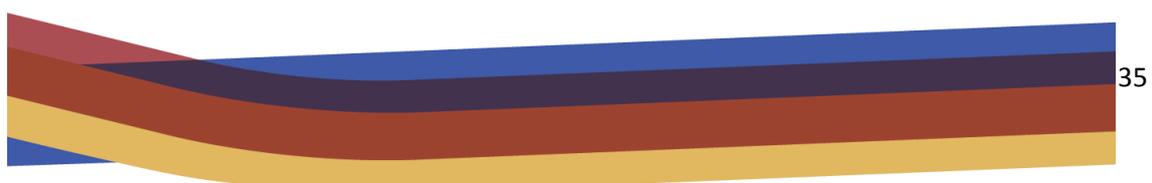
PENDAMPINGAN

Hasil pendampingan atau supervisi luring, yang telah dilakukan dari 12 Agustus s.d 16 September 2021, dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pendampingan atau supervisi luring, dengan metode kunjungan dan observasi langsung ke lembaga PAUD dan TK se Provinsi Banten telah berhasil dilaksanakan dengan total lembaga dampingan berjumlah 1920 PAUD TK se Provinsi Banten, dengan rincian sebagai berikut.

Kab/Kota	Supervisi Luring/Pendampingan
Kabupaten Tangerang	266
Kabupaten Serang	364
Kabupaten Pandeglang	269
Kabupaten Lebak	268
Kota Tangerang	283
Kota Tangerang Selatan	184
Kota Serang	172
Kota Cilegon	114
Total	1920

Berdasarkan laporan hasil pendampingan yang dihimpun dari para penilik dan pengawas, dapat diperoleh kendala-kendala, beserta solusi-solusi perbaikan juga saran



masukannya baik bagi lembaga dampingan maupun dalam penyelenggaraan pendampingan. Laporan Hasil pendampingan berupa laporan per lembaga dampingan dari semua penilik dan pengawas kab/kota dan Laporan akhir yang merupakan rekapitulasi gambaran pelaksanaan pendampingan di kab/kota di wilayah pengawas dan penilik yang menjadi pendamping/supervisor.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

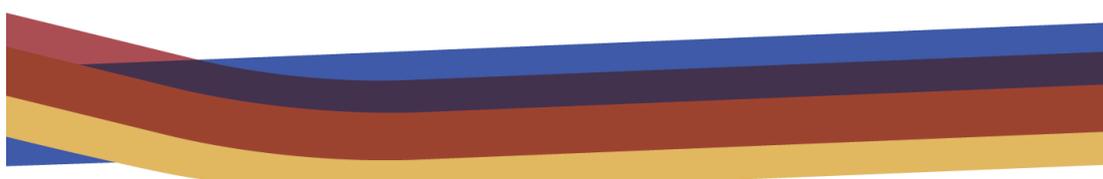
Capaian Standar Nasional Pendidikan

No.	SNP	Nilai SNP > Rata ² Provinsi	Nilai SNP < Rata ² Provinsi
1.	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STPPA)	Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Lebak	Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Pandeglang, dan Kab. Tangerang.
2.	Standar Isi	Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kab. Lebak	Kota. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang.
3.	Standar Proses	Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kab. Lebak.	Kota Tangerang, Kab. Tangerang, kota Serang, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang.
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kab. Tangerang	Kota. Serang, Kota Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, dan Kab. Serang.

No.	SNP	Nilai SNP > Rata ² Provinsi	Nilai SNP < Rata ² Provinsi
5.	Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras)	Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota. Tangerang	Kota. Serang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, dan Kab. Serang
6.	Standar Pengelolaan	Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kab. Tangerang	Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kota Serang, Kab. Serang dan, Kab. Pandeglang
7.	Standar Pembiayaan	Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kab. Lebak, dan Kab. Tangerang	Kota Serang, Kota Tangerang, Kab. Pandeglang, dan Kab. Serang .
8.	Standar Penilaian	Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan kab. Lebak	Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kab. Pandeglang, dan Kab. Serang

Capaian Standar Nasional Pendidikan

No.	SNP	Nilai SNP > Rata ² Provinsi	Nilai SNP < Rata ² Provinsi
1.	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (STPPA)		
	a. Deteksi pertumbuhan anak	Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Lebak	Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Pandeglang, dan Kab. Tangerang.
	b. Deteksi perkembangan anak	Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Lebak	Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Pandeglang, dan Kab. Tangerang.

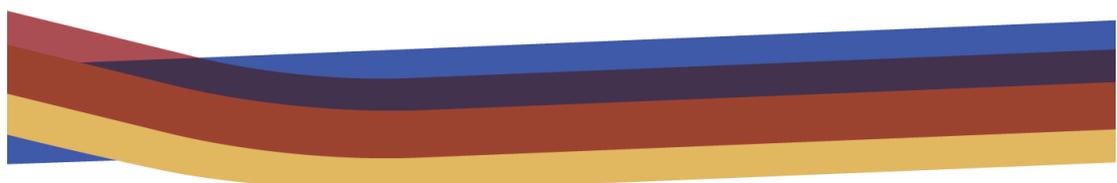


No.	SNP	Nilai SNP > Rata ² Provinsi	Nilai SNP < Rata ² Provinsi
2.	Standar Isi		
	a. Dokumen KTSP	Kota Cilegon, dan kota Tangerang Selatan	Kab. Lebak, kota Serang, kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, dan Kab. Serang
	b. Acuan kurikulum	Kota Cilegon, kota Tangsel, kab. Lebak, Kota Serang dan Kab. Tangerang	Kota Tangerang, kab. Pandeglang, dan Kab. Serang
	c. Layanan menurut usia	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan kab. Tangerang	Kab. Lebak, Kota Serang, kota Tangerang, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
3.	Standar Proses		
	a. Perencanaan pembelajaran	Kota Cilegon, dan kota Tangsel	Kab. Lebak, kota Tangerang, kab. Tangerang, kab. Serang, kota Serang, dan Kab. Pandeglang
	b. Prosem	Kota Cilegon, Kota Tangsel, dan kota Tangerang	Kab. Lebak, kab. Tangerang, kab. Serang, kota Serang, dan kab. Pandeglang
	c. RPPM	Kota Cilegon, kota Tangsel, kab. Lebak, kota Tangerang, dan kab. Tangerang	Kota Serang, kab. Serang, dan Kab. Pandeglang
	d. RPPH	Kota Cilegon, dan Kota Tangsel	Kab. Lebak, kota Tangerang, kab. Tangerang, kab. Serang, kota Serang, dan kab. Pandeglang
	e. Pelaksanaan Pembelajaran	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan kab. Tangerang	Kab. Lebak, kab. Tangerang, kab. Serang, dan kab. Pandeglang
	f. Supervisi Pembelajaran	Kota Cilegon, kota Tangsel, kab. Lebak, dan kab. Tangerang	Kota Tangerang, kab. Serang, kota Serang, dan kab. Pandeglang
	g. Keterlibatan Orangtua	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan kab. Pandeglang	Kab. Lebak, kota Tangerang, kab. Serang, dan kab. Pandeglang

No.	SNP	Nilai SNP > Rata ² Provinsi	Nilai SNP < Rata ² Provinsi
4.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		
	a. kualifikasi akademik pendidik	Kota Cilegon, kota Tangerang Selatan, dan kab. Tangerang	Kota Serang, kota Tangerang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	b. kuaifikasi kompetensi pendidik	Kota Cilegon, kota Tangsel, kota Tangerang, dan kab. Lebak	Kota Serang, kota Tangerang, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	c. kualifikasi akademik pengelola	Kota Cilegon, kota Tangsel, kota Tangerang, dan kota Serang	Kota Tangerang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	d. kualifikasi kompetensi pengelola	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan kab. Tangerang	kota Tangerang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	e. kualifikasi akademik tenaga kependidikan	Kota Cilegon, kota Tangerang, dan kab. Tangerang	Kota Serang, kota Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, dan Kab. Serang
5.	Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras)		
	a. Sarana pendidikan	Kota Cilegon, kota Tangsel, kota Tangerang, dan kota Serang	Kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	b. Sarana pembelajaran	Kota Cilegon, kota Tangsel, kota Tangerang, dan kota Serang	Kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	c. Prasarana instalasi	Kota Cilegon, kota Tangsel, kota Tangerang, dan kota Serang	Kab. Tangerang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	d. Prasarana luar	Kota Cilegon, kota Tangsel, kota Serang, dan kab. Tangerang	Kota Tangerang, kab. LEbak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	e. Prasarana Gedung	Kota Cilegon, kota Tangsel, kota Tagerang, dan Kab. Tangerang	Kota Serang, kab. Lebak, kab. Pandeglang, dan kab. Serang

No.	SNP	Nilai SNP > Rata ² Provinsi	Nilai SNP < Rata ² Provinsi
	f. Prasarana Halaman bermain	Kota Cilegon, kota Tangsel, kab.Tangerang, dan kota Serang	Kota Tangerang, kab.Lebak, kab.Pandeglang, dan Kab. Serang
	g. Prasarana status lahan	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan kab.Tangerang	Kota Tangerang, kab.Tangerang, kab.Lebak, kab.Pandeglang, dan Kab.Serang
6.	Standar Pengelolaan		
	a. Perencanaan satuan	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan kab.Tangerang	Kab.Lebak kota Tangerang, kota Serang kab. Serang, dan kab. Pandeglang
	b. pengorganisasian	Kota Cilegon, kota Tangsel, kab.Tangerang, dan kota Tangerang	Kab.Lebak, kota Serang, kab. Serang dan Kab. Pandeglang
	c. pelaksanaan	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan Kab.Tangerang	Kab. Lebak, kota Tangerang, kota Serang, kab. Serang, dan Kab. Pandeglang
	d. Pengawasan/supervisi	Kota Cilegon, kota Tangsel, kab.Tangerang, dan kab.Lebak	Kota Tangerang, kota Serang, kab.Serang, dan kab. Pandeglang
	e. Supervisi Kepala Sekolah	Kota Cilegon, kota Tangsel,kab.Tangerang, dan kab.Lebak	Kota Tangerang, kota Serang, kab.Serang, dan kab. Pandeglang
	f. Program Keterlibatan orangtua	Kota Cilegon, kota Tangsel,kab.Tangerang, dan kab.Lebak	Kota Tangerang, kota Serang, kab.Serang, dan kab. Pandeglang
	g. Pengawasan/supervisi	Kota Cilegon, kota Tangsel, kab.Tangerang, dan kab.Lebak	Kota Tangerang, kota Serang, kab.Serang, dan kab. Pandeglang

No.	SNP	Nilai SNP > Rata ² Provinsi	Nilai SNP < Rata ² Provinsi
7.	Standar Pembiayaan		
	a. Pembiayaan satuan PAUD	Kota Cilegon, kota Tangsel, kota Serang, dan kab. Tangerang	Kab. Lebak, kota Tangerang, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	b. Administrasi keuangan	Kota Cileogn, kota Tangsel, kab. Lebak, dan kota Serang	Kota Tangerang, kab. Tangerang, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
	c. Laporan keuangan	Kota Cileogn, kota Tangsel, kota Serang, dan kab. Lebak	Kota Tangerang, kab. Tangerang, kab. Pandeglang, dan kab. Serang
8.	Standar Penilaian		
	a. Perencanaan penilaian perkembangan anak	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan Kab. Tangerang	Kab. Lebak, kota Tangerang, kab. Serang, kota Serang, dan Kab. Pandeglang
	b. Pelaksanaan penilaian perkembangan anak	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan kab. Tangerang	Kab. Lebak, kota Tangerang, kab. Serang, kota Serang, dan Kab. Pandeglang
	c. Penerapan prinsip penilaian	Kota Cilegon, kota Tangsel dan Kota Serang	Kab. Lebak, kota Tangerang, kab. Serang, dan kab. Pandeglang
	d. Pelaporan hasil penilaian perkembangan anak	Kota Cilegon, kota Tangsel, dan Kota Tangerang	Kab. Lebak kab. Tangerang, kab. Serang, kota Serang, dan kab. Pandeglang



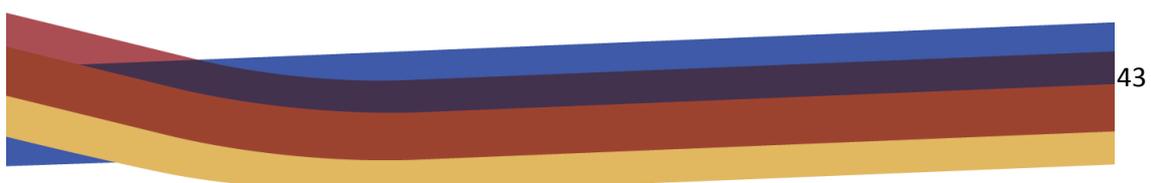
BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Tujuan supervisi mutu satuan PAUD tahun 2021 ini pada dasarnya telah tercapai dengan baik dengan keberhasilan terlaksananya supervisi online dan pendampingannya (supervisi luring).
2. Pelaksanaan supervisi online bahkan menunjukkan keterisian dari pengelola yang melebihi quota supervisi daring yakni 115% dari quota supervisi daring berjumlah 2011 satuan PAUD, keterisian Pengelola berjumlah 2325 satuan PAUD, dengan penilaian dari para penilik dan pengawas berjumlah 1796 atau 97% dari total juga dari total quota supervisi daring sejumlah 2011 satuan PAUD.
3. Apabila dilihat dari analisis capaian SNP maka, capaian SNP tertinggi (melebihi capaian rata-rata provinsi) dicapai oleh Kota Cilegon dengan capaian 93,0%, dan capaian terendah (lebih rendah dari capaian rata-rata provinsi) dicapai oleh Kab. Pandeglang dengan capaian 58,8%.
4. Dari capaian setiap SNP, diperoleh capaian beberapa SNP berikut:
 - a. Capaian STPPA dengan nilai tertinggi yakni 93,0% diperoleh satuan di Kota Cilegon , sedangkan capaian STPPA terendah yakni 65% diperoleh oleh Kab. Tangerang;
 - b. Capaian Standar Isi dengan nilai tertinggi yakni 86,8% diperoleh satuan di Kota Cilegon, sedangkan capaian standar Isi terendah yakni 63% diperoleh satuan di Kab. Serang;
 - c. Capaian Standar Proses dengan nilai tertinggi yakni 91,5% diperoleh satuan di kota Cilegon, sedangkan capaian Standar Proses terendah yakni 68,4% diperoleh satuan di Kab. Pandeglang;
 - d. Capaian Standar PTK dengan nilai tertinggi yakni 81,2 % diperoleh satuan di Kota Cilegon, sedngkan capaian Standar PTK terendah yakni 63,7% diperoleh satuan di Kab. Serang;

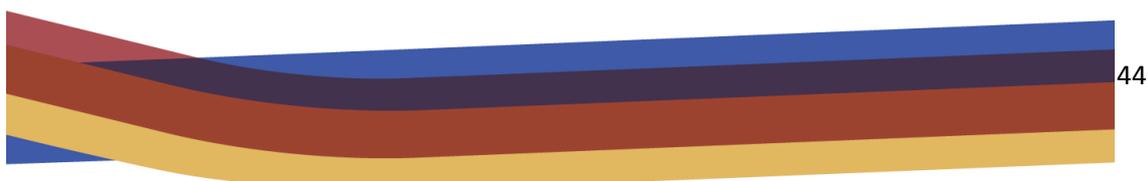
- e. Capaian Standar Sarpras dengan nilai tertinggi yakni 84,6% diperoleh satuan di Kota Tangsel, sedangkan Capaian Standar Sarpras terendah yakni 66,2% diperoleh satuan di Kab. Serang;
5. Capaian Standar Pengelolaan dengan nilai tertinggi yakni 84,4% diperoleh satuan di Kota Cilegon, sedangkan Capaian Standar Pengelolaan terendah yakni 58% diperoleh satuan di Kab. Pandeglang;
6. Capaian Standar Pembiayaan dengan nilai tertinggi yakni 85,6% diperoleh satuan di Kota Cilegon, sedangkan Capaian Standar Pengelolaan terendah yakni 62% diperoleh satuan di Kab. Serang; dan
7. Capaian Standar Penilaian dengan nilai tertinggi yakni 88,9% diperoleh satuan di Kota Cilegon, sedangkan Capaian Standar Penilaian terendah yakni 61% diperoleh satuan di Kab. Serang.
8. Capaian Performance, meliputi 2 (dua) komponen yakni komponen performance pengelolaan/kelembagaan; dan komponen pembelajaran (inti)
 - a. Performance pengeolan/kelembagaan yang meliputi SDM (guru), SM (adminisitrasi, Material, Metode, Materi da alat /TIK, dengan nilai sangat tinggi dimiliki oleh Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan kab./kota dengan performance tinggi berturut-turut diliki oleh kab. Tangerang, kota Serang, kota Tangerang, kab. Lebak, kab. Serang, dan kab Pandeglang; Nihil.
 - b. Performance pembelajaran yang meliputi tampilan sarpas, penyambutan, pembukaan, kegiatan inti dan penutupan, dengan nilai sangat tinggi dimiliki oleh Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan kab./kota dengan performance tinggi berturut-turut diliki oleh kab. Tangerang, kota Serang, kota Tangerang, kab. Lebak, kab. Serang, dan kab Pandeglang. Performance rendah dan snagat rendah Nihil.



REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dari kesimpulan di atas yaitu :

1. Peningkatan ketercapaian 8 (delapan) SNP bagi kab/ kota dengan Total SNP yang masih lebih rendah dari nilai rata-rata provinsi, yakni :
 - a. Peningkatan ketercapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan anak (STPPA) yakni Kab. Serang, Kota Tngerang, Kota Tangerang Selatan, kab. Pandeglang dan Kab. Tangerang.
 - b. Peningkatan ketercapaian Standar isi yakni Kota Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang.
 - c. Peningkatan ketercapaian Standar Proses yakni Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang.
 - d. Peningkatan ketercapaian Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) yakni Kota Serang, Kota Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang.
 - e. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras) yakni Kota Kota Serang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang.
 - f. Peningkatan Standar pengelolaan yakni Kab. Lebak, Kota Tangerang, kota Serang, Kab. Serang dan Kab. Pandeglang
 - g. Peningkatan Standar pembiayaan yakni kota Serang, Kota Tangerang, Kab. Pandeglang dan , Kab. Serang
 - h. Peningkatan Standar penilaian yakni Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kab. Pandeglang dan Kab. Serang
2. Dilakukannya peningkatan kinerja supervisor menuju supervisi yang maksimal menuju 100% dari keterisian penilaian supervisor 97%
3. Mengimplementasikan solusi perbaikan dan saran rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan pendampingan satuan PAUD tahun 2021 kepada para penilik dan pengawas sesuai dengan wilayah dampungannya; dan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas satuan PAUD yang terakreditasi BAN PAUD dan PNF.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
**BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS
PROVINSI BANTEN**

